



# **BUPATI ACEH UTARA**

# POKOK POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

## Disusun Oleh TIM PENYUSUN POKOK POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

Disetujui Oleh, BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB



## **BUPATI ACEH UTARA**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Kekayaan khasanah budaya adat bangsa merupakan rahmat Allah SWT, terutama keberanekaragaman Keberagaman budaya daerah yang sekaligus merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan ditengah dinamika perkembangan budaya Nasional dan Internasional. Oleh karena itu untuk memajukann Kebudayaan Nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.

Guna memenuhi maksud dan tuntutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Tim Penyusun telah menyiapkan Pokok Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang memuat faktual dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemajuan kebudayaan serta upaya dan strategi penyelesaiannya.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan penghargaan dan terimakasih kepada Tim Penyusun, Tim Pendamping dari Dirjen Kebudayaan dan BPNB Aceh yang telah merampungkan penulisan laporan ini dengan harapan kiranya dapat berguna dan bermanfaat bagi para pihak yang membutuhkan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Lhoksukon, 28 September 2018 BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

## DAFTAR ISI POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2018

		HAL
LEMBA	R PERSETUJUAN	i
SAMBL	JTAN BUPATI ACEH UTARA	ii
DAFTA	R ISI	iii - iv
BAB I	RANGKUMAN UMUM	1 - 2
BAB II	PROFIL KABUPATEN ACEH UTARA	3 - 28
	II.1 Tentang Kabupaten Aceh Utara	3
	II.1.1 Wilayah dan Karakteristik Alam	3
	II.1.2 Demografi	11
	II.1.3 Latar Belakang Budaya	17
	II.1.3.1 Corak Utama	17
	II.1.3.2 Keragaman Budaya	19
	II.1.4 Sejarah	19
	II.1.4.1Sejarah Singkat Budaya	19
	II.1.4.2 Sejarah Singkat Wilayah Administratif	21
	II.1.5 Peraturan Tingkat Daerah Terkait Kebudayaan	25
	II.1.5.1 Peraturan yang berlaku	25
	II.1.5.2 Peraturan yang Pernah Ada dan Sudah Tidak Berlaku	25
	II.2 Ringkasan Proses Penyusunan PPKD	25
	II.2.1 Tim Penyusun	26
	II.2.2 Proses Pendataan	26
	II.2.3 Proses Penyusunan Masalah dan Rekomendasi	26
	II.2.4 Catatan Evaluasi atas Proses Penyusunan	27
BAB III	LEMBAGA PENDIDIKAN BIDANG KEBUDAYAAN	28
	III.1 Lembaga Pendidikan Menengah Bidang Kebudayaan	28
	III.2 Lembaga Pendidikan Tinggi Bidang Kebudayaan	28
BAB IV	DATA OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN	29
	IV.1 Manuskrip	29
	IV.2 Tradisi Lisan	30
	IV.3 Adat Isti adat	31
	IV.4 Ritus	32
	IV.5 Pengetahuan Tradisional	32
	IV.6 Teknologi Tradisional	33
	IV.7 Seni	34
	IV.8 Bahasa	35
	IV.9 Permainan Rakyat	35
	IV.10 Olahraga Tradisional	36
	IV.11 Cagar Budaya	36

BAB V	DATA SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN DAN LEMBAGA KEBUDA	IAAY
	DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN	38
	V.1 Manuskrip	38
	V.2 Tradisi Lisan	39
	V.3 Adat Isti adat	40
	V.4 Ritus	41
	V.5 Pengetahuan Tradisional	41
	V.6 Teknologi Tradisional	42
	V.7 Seni	44
	V.8 Bahasa	45
	V.9 Permainan Rakyat	46
	V.10 Olahraga Tradisional	46
	V.11 Cagar Budaya	47
BAB VI	DATA SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN	50
	VI.1 Manuskrip	50
	VI.2 Tradisi Lisan	50
	VI.3 Adat Isti adat	51
	VI.4 Ritus	51
	VI.5 Pengetahuan Tradisional	52
	VI.6 Teknologi Tradisional	52
	VI.7 Seni	53
	VI.8 Bahasa	53
	VI.9 Permainan Rakyat	54
	VI.10 Olahraga Tradisional	54
	VI.11 Cagar Budaya	54
BAB VI	I PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI	57
	VII.1 Permasalahan dan Rekomendasi	57
	VI.1 Manuskrip	57
	VI.2 Tradisi Lisan	59
	VI.3 Adat Isti adat	60
	VI.4 Ritus	61
	VI.5 Pengetahuan Tradisional	62
	VI.6 Teknologi Tradisional	63
	VI.7 Seni	64
	VI.8 Bahasa	66
	VI.9 Permainan Rakyat	67
	VI.10 Olahraga Tradisional	68
	VI.11 Cagar Budaya	69
	VII.2. Upaya	70
	VII.3. Permasalahan Umum dan Rekomendasi Umum	70

## **BAB VIII LAMPIRAN**

## BAB I RANGKUMAN UMUM

Aceh Utara merupakan salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Aceh, dengan luas wilayah sebesar 3.296,86 Km2 dan berpenduduk sebanyak 541.878 jiwa, dominan berusaha di sektor pertanian. Jumlah penduduk tersebut tersebar di 27 kecamatan, 70 kemukiman 852 gampong (Desa).

Batas wilayah Kabupaten Aceh Utara; sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bireuen, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah, sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kota Lhokseumawe. Letak geografis berda pada garis 96° 55′, 97° 04′, 97° 12′, dan 97° 22′ BT

Iklim Wilayah Kabupaten Aceh Utara, termasuk tipe iklim muson; ddengan klasifikasi iklim tipe C. Curah hujan tahunan berkisar antara 1000-2500 mm, Musim hujan terjadi pada bulan Agustus sampai Januari, dengan curah hujan maksimal terjadi di bulan Oktober-November. Rata-rata suhu udara adalah  $30^{\circ}$  C, dengan kisaran antara $26^{\circ}$  C sampai  $36^{\circ}$  C

Corak Utama Budaya Aceh Utara adalah Budaya Aceh, yang sangat memegang teguh nilai-nilai agama Islam. Budaya Aceh dalam kompleksitasnya terdiri dari; adat istiadat, Sejarah dan Kesenian. Dari tampilan adat Istiadat, dikenal dengan 3 kelompok adat yaitu; Adat Perkawinan, Adat Berusaha dan Adat Kematian.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan Kebudayaan bahwa Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada antara lain; Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota maka Kabupaten Aceh Utara telah menyusun Pokok-pokok pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Aceh Utara yang disusun oleh Tim Penyusun PPKD Kabupaten Aceh Utara yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 430/421/2018 tanggal 7 September 2018. Tahapan penyusunan PPKD diawali dengan Proses Pendataan yang dilanjutkan dengan Proses Penyusunan Masalah dan Rekomendasi. Ada beberapa catatan Catatan Evaluasi atas Proses Penyusunan PPKD Kabupaten Aceh Utara antara lain; Kegiatan Penyusunan

PPKD tidak diawali dengan perencanaan alokasi anggaran, sehingga Daerah tidak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan ini.

Kabupaten Aceh Utara Meliki beberapa lembaga pendidikan menengah yang berhubungan dengan Kebudayaan dan satu Perguruan Tinggi yaitu Universitas Malikussalah dengan jenjang Strata 1 dan 2.

Dari 11 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang diamati, OPK Cagar Budaya merupakan nobjek yang menempati nilai tertinggi.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pemajuan kebudayaan Aceh utara antara lain ; Tidak ada catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai OPK sehingga tidak dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik, idak ada program pertunjukan seni secara berkala, Tidak ada program Pengkajian, penelitian dan publikasi.OPK secara berkala dan tidak ada regenerasi pelaku OPK.

## BAB II PROFIL KABUPATEN ACEH UTARA

## II.1 Tentang Kabupaten Aceh Utara

## II.1.1 Wilayah dan Karakteristik Alam

Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032 disebutkan bahwa luas wilayah berdasarkan Undang-undang Daruratt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, dikurangi dengan luas wilayah pembentukan Kabupaten Bireun berdasarkan Undang-Undang Nomot 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Simeulue dan luas wilayah pembentukan Kota Lhokseumawe berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe. Dengan demikian luas Kabupaten Aceh Utara sebesar 3.296,86 km², atau 329.686 Ha. Secara geografi, batas wilayah Kabupaten Aceh Utara saat ini bersebelahan :

Sebelah utara : SelatMalaka dan Kota Lhokseumawe

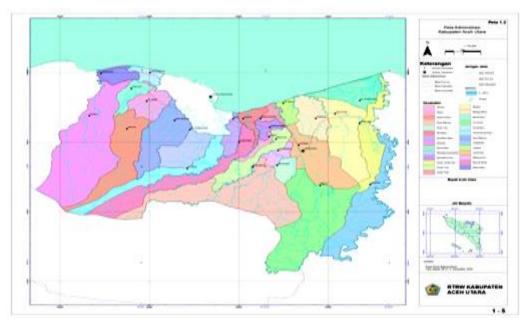
Sebelah timurSebelah selatanKabupaten Aceh Timur.Kabupaten Bener Meriah.

• Sebelah barat : Kabupaten Bireuen

Secara administrasi wilayah Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 27 kecamatan 70 kemukiman 852 gampong.Sejak tahun 2009, secara administrasi perdesaan kabupaten Aceh utara hanya memiliki wilayah gampong sebagaimana Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara.Kecamatan Paya Bakong merupakan kecamatan terluas dengan luas 418,32 km² atau 12,69 persen dari luas Kabupaten Aceh Utara. Masing-masing kecamatan dibagi dalam 1 sampai 4 kemukiman.Pemerintahan Mukim diataur dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim, disebutkan kedudukan mukim sebagai unit pemerintahyang membawahi beberapa gampong yang dipimpin oleh seorang Imuem Mukim yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat.

Gambaran tematik batas wilayah dan data luas wilayah disajikan dalam gambar dan tebel berikut ini :

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupten Aceh Utara



Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013

Tabel 2.1 Luas Wilayah, Jumlah Kemukimandan Jumlah Gampong di Kabupaten Aceh Utara menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	%	Jumlah Kemukiman	Jumlah Gampong
1.	Sawang	384,65	11,67	2	39
2.	Nisam	193,47	5,87	3	29
3.	Nisam Antara	30,00	0,91	1	6
4.	Banda Baro	18,00	0,55	1	9
5.	Kuta Makmur	151,32	4,59	3	39
6.	Simpang Kramat	79,78	2,42	2	16
7.	Syamtalira Bayu	75,36	2,29	4	38
8.	Geureudong Pase	271,45	8,23	1	11
9.	Meurah Mulia	202,57	6,14	3	50

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	%	Jumlah Kemukiman	Jumlah Gampong
10.	Matangkuli	78,65	2,39	4	49
11.	Paya Bakong	418,32	12,69	4	39
12.	Pirak Timu	45,99	1,39	2	23
13.	Cot Girek	189,00	5,73	3	24
14.	Tanah Jambo Aye	162,98	4,94	4	47
15.	Langkahan	150,52	4,57	3	23
16.	Seunuddon	100,63	3,05	3	33
17.	Baktiya	158,67	4,81	3	57
18.	Baktiya Barat	83,08	2,52	3	26
19.	Lhoksukon	243,00	7,37	4	75
20.	Tanah Luas	30,64	0,93	3	57
21.	Nibong	44,91	1,36	2	20
22.	Samudera	43,28	1,31	3	40
23.	Syamtalira Aron	28,13	0,85	4	34
24.	Tanah Pasir	20,29	0,62	1	18
25.	Lapang	19,36	0,59	1	11
26.	Muara Batu	33,34	1,01	2	24
27.	Dewantara	39,47	1,20	2	15
	TOTAL	3.296,86	100,00	71	852

Sumber: BPS Aceh Utara Tahun 2016

Dilihat berdasarkan kemukiman, Kecamatan Syamtalira Bayu, Matangkuli, Paya Bakong, Tanah Jambo Aye, Lhoksukon dan Syamtalira Aron masing-masing memiliki 4 kemukiman. Sedangkan jumlah gampong terbanyak di Kecamatan Lhoksukon yaitu sebanyak 75 gampong, sementara itu jumlah gampong paling sedikit yakni sebanyak 6 gamapong berada di Kecamatan Nisam Antara yang merupakan kecamatan hasil pemekaran dari kecamatan nisam yang merupakan kecamatan induk.

Dari sisi Topografi dan Marfologi, Sebelah utara berbatasan dengan laut, yaitu Selat Malaka, dan di sebelah selatan adalah kaki atau lereng pegunungan, maka secara umum bentuk permukaan bumi atau geomorfologi Kabupaten Aceh Utara dari arah pantai ke arah pegunungan adalah :

- Dataran pantai, yang terletak sepanjang tepi pantai.
- Dataran aluvial, yang terletak relatif memanjang di belakang dataran pantai.
- Zona lipatan, yang terletak relatif memanjang di belakang dataran aluvial.
- Zona volkanik, yang merupakan kaki/lereng sampai punggungan pegunungan.

Selaras dengan geomorfologi tersebut, pada Gambar dibawah ini diperlihatkan profil wilayah menurut arah utara – selatan, masing-masing pada garis  $96^{\circ}$  55′,  $97^{\circ}$  04′,  $97^{\circ}$  12′, dan  $97^{\circ}$  22′ BT. Berdasarkan Peta Rupa Bumi skala 1 : 50.000 (BAKOSURTANAL), yang menggambarkan topografi menurut garis ketinggian (kontur) Aceh Utara sebaran utamanya menurut selang ketinggian (Gambar 2.2) yaitu :

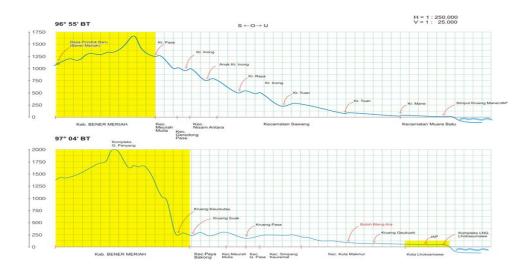
0 - 25 m dpl
146.096 Ha, atau 44,31 %;
25 - 100 m dpl
63.781 Ha, atau 19,35 %;
100 - 500 m dpl
88.526 Ha, atau 26,85 %;
500 - 1000 m dpl
20.932 Ha, atau 6,35 %;
Di atas 1000 m dpl
10.351 Ha, atau 3,14%

Berdasarkan Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Aceh Utara, dari Yayasan Leuser Internasional (YLI), dapat dikemukakan sebaran kemiringan lahan di Aceh yaitu :

0 - 2 % : 50,38 %, atau sekitar 166.063 Ha;
2 - 8 % : 18,85 %, atau sekitar 62.146 Ha;
8 - 15 % : 10,54 %, atau sekitar 34.749 Ha;
15 - 25 % : 9,59 %, atau sekitar 31.617 Ha;
25 - 40 % : 7,26 %, atau sekitar 23.935 Ha;
> 40 % : 3,39 %, atau sekitar 11.176 Ha.

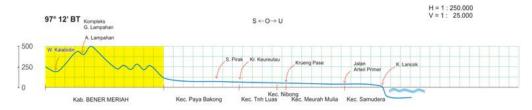
Gambaran profil marfologi, Ketinggian dan kemiringan lahan dapat dilihat pada gambar berikut ini :

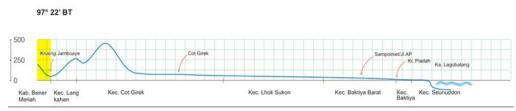
Gambar 2.2
Profil Morfologi Wilayah Kabupaten Aceh Utara



#### **GAMBAR LANJUTAN**

#### PROFIL WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA





Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Utara

Peta Ketinggian Lahan Kabupaten AcehUtara

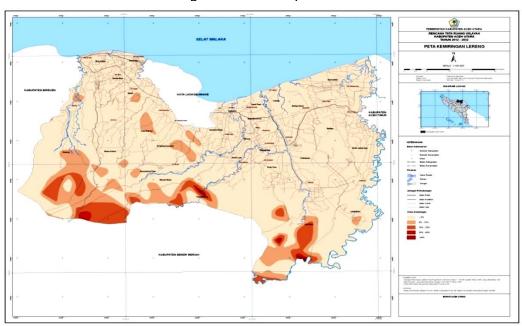
Total Aceh Utara

Peta Ketinggian Lahan Kabupaten Aceh Utara

Peta

Gambar 2.3 Peta Ketinggian Lahan Kabupaten AcehUtara

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Utara



Gambar 2.4 Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Aceh Utara

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Utara

Iklim Wilayah Kabupaten Aceh Utara sebagai bagian dari wilayah Provinsi Aceh, termasuk tipe iklim muson; dan klasifikasi menurut Mohr, Schmid & Ferguson, termasuk iklim tipe C. Wilayah Kabupaten Aceh Utara relatif lebih kering dibandingkan dengan dengan wilayah lainnya di Provinsi Aceh, karena pengaruh Pegunungan Bukit Barisan, di mana wilayah sebelah utara dan timur Pegunungan Bukit Barisan cenderung lebih kering dibandingkan wilayah sebelah barat dan selatannya.

Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Aceh Utara berkisar antara 1000 – 2500 mm, dengan hari hujan 92 hari. Musim hujan terjadi pada bulan Agustus sampai Januari, dengan curah hujan maksimal terjadi di bulan Oktober-November, yang mencapai di atas 350 mm per bulan dengan hari hujan lebih dari 14 hari. Sementara musim dengan curah hujan lebih rendah (cenderung kemarau) terjadi pada bulan Februari sampai Juli, dan yang cenderung terendah adalah sekitar bulan Maret-April.

Rata-rata suhu udara adalah  $30^{\circ}$  C, dengan kisaran antara $26^{\circ}$  C sampai  $36^{\circ}$  C. Suhu rata-rata pada musim penghujan adala $28^{\circ}$  C, dan pada musim kemarau suhu rata-rata adalah  $32,8^{\circ}$  C. Kelembaban udara berkisar antara 84-89 %, dengan rata-rata 86,6 %. Lebih jelasnya sebagaimanatercantum Gambar 2.5.

Jebis Tanah dan Kedalaman Efektif Tanah, Jenis tanah mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kesesuaian lahan untuk budidaya pertanian maupun non-pertanian yang akan dikembangkan. Pengenalan terhadap karakteristik dan sebaran jenis tanah sangat penting terkait dengan upaya pemanfaatan sumber daya tanah/lahan di Kabupaten Aceh Utara.

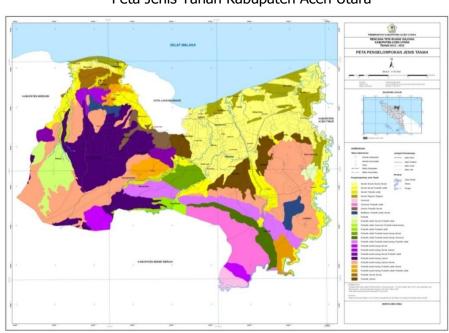
Secara umum sebaran jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara dapat dibedakan atas 2 kelompok besar, yaitu dominan kelompok hidromorf di pesisir, sementara kelompok podsolik dominan di pedalaman. Karakter ini selaras pula dengan kedalaman efektif tanah, di mana sejak dari yang terdalam(>90 cm) sampai yang terdangkal (<30 cm) adalah mengikuti pola dari pesisir ke pedalaman. Jelasnya Jenis tanah dan curah hujan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.5
Peta Curah Hujan Kabupaten Aceh Utara

\*\*TRIBUTATION LEGIS ALTO MALAKA

\*\*PETAT MAL

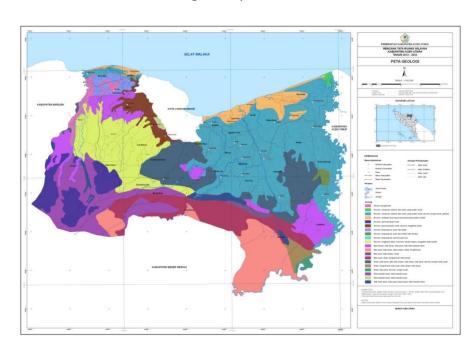
Sumber: Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara



Gambar 2.6 Peta Jenis Tanah Kabupaten Aceh Utara

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Utara

*Geologi,* Struktur geologi yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Utara secara garis besar terdiri atas batuan Quarter yang cenderung di bagian pesisir (bagian utara), dan batuan Tersier yang cenderung di bagian pedalaman (bagian selatan). Sebaran ini selaras dengan topografi yang menaik dari utara ke selatan, dan selaras pula dengan pola hilir ke hulu dalam DAS. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 2.7. Peta Geologi Kabupaten Aceh Utara

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Utara

## II.1.2 Demografi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara tercatat 593.492 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 2,00persen per tahun. Luas wilayah3.296,86 km² maka kepadatan penduduk mencapai180jiwa/km² dengan sebaran di 27 kecamatan selama periode tahun 2012 -2016 sebagaimana tercantum pada Tabel 2.2.

Ditinjau dari distribusi penduduk terbesar di Kecamatan Lhoksukon mencapai 49.997 jiwa dan kepadatan penduduk terbesar di Kecamatan Dewantara mencapai 1.249jiwa/km², sedangkan jumlah dan kepadatan penduduk terkecil di

Kecamatan Geureudong Pase mencapai 5.002 jiwa atau 18 jiwa/km². Bila dilihat dari letaknya, maka dapat diindikasikan bahwa kecamatan-kecamatan di sekitar sumbu wilayah atau di sekitar jalan nasional cenderung mempunyai jumlah dan kepadatan penduduk lebih besar

Tabel 2.2.

Perkembangan Distribusi Penduduk Kabupaten Aceh Utara menurut Kecamatan Tahun 2013-2017

No.	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Sawang	34.999	35.457	36.502	37.198	35.811
2	Nisam	17.473	17.702	18.223	18.571	17.522
3	Nisam Antara	12.447	12.610	12.981	13.229	12.384
4	Banda Baro	7.518	7.617	7.841	7.991	7.546
5	Kuta Makmur	22.648	22.945	23.621	24.072	24.722
6	Simpang Kramat	8.946	9.063	9.330	9.508	11.872
7	Syamtalira Bayu	19.309	19.562	20.138	20.522	19.673
8	Geureudong Pase	4.613	4.674	4.812	4.904	4.617
9	Meurah Mulia	18.129	18.367	18.908	19.269	18.255
10	Matangkuli	17.035	17.258	17.766	18.105	17.295
11	Paya Bakong	13.053	13.224	13.614	13.874	14.474
12	Pirak Timu	7.624	7.724	7.952	8.104	7.805
13	Cot Girek	19.021	19.270	19.838	20.216	18.742
14	Tanah Jambo Aye	41.032	41.569	42.794	43.610	38.579
15	Langkahan	21.514	21.796	22.438	22.866	24.138
16	Seunuddon	23.800	24.112	24.822	25.295	24.441
17	Baktiya	33.978	34.423	35.437	36.113	33.284
18	Baktiya Barat	17.574	17.804	18.328	18.678	17.373
19	Lhoksukon	46.101	46.704	48.080	48.997	64.381

No.	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017
20	Tanah Luas	22.913	23.213	23.897	24.353	32.098
21	Nibong	9.375	9.498	9.778	9.964	13.175
22	Samudera	25.446	25.779	26.538	27.044	35.619
23	Syamtalira Aron	17.066	17.289	17.798	18.138	16.922
24	Tanah Pasir	8.548	8.660	8.915	9.085	8.440
25	Lapang	8.187	8.294	8.538	8.701	7.965
26	Muara Batu	25.527	25.861	26.623	27.131	24.680
27	Dewantara	45.496	46.091	47.449	48.354	41.679
Jum	ah	549.370	556.566	572.961	583.892	593.492

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh Utara Tahun 2018

Pertumbuhan ekonomi Aceh Utara menurut lapangan usaha tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.3, Ditinjau dari kontribusi lapangan usaha, dapat dilihat pada Tabel 2.4, peranan sektor migas semakin menurun dari 43,87 persen pada tahun 2012 menjadi 14,90 persen pada tahun 2017. Jika ditinjau PDRB ADHB tanpa migas, kontribusi terbesar adalah sektor pertanian yang meningkat dari 19,83 persen pada tahun 2013 menjadi 32,75 persen pada tahun 2017. Kontribusi besar kedua adalah sektor industri pengolahan sebesar 14,61 persen pada tahun 2013 dan 14,39 persen pada tahun 2017 dan selanjutnya sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi sebesar 6,99 persen pada tahun 2013 meningkat menjadi 12,33 persen pada tahun 2017. Pada urutan keempat, sektor transportasi dan pergudangan dengan kontribusi 3,87 persen pada tahun 2013 meningkat menjadi 5,94 persen pada tahun 2017.

Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor Tahun 2012-2016 (Persen)

SEKTOR	CAPAIAN					
	2012	2013	2014	2015	2016	
Pertanian	4,14	6,06	4,17	4,10	4,77	
Pertambangan dan Penggalian  - Pertambangan migas dan panas bumi - Pertambangan dan penggalian lainnya	-2,93 -3,01 1,59	-8,03 -8,37 10,68	-14,61 -15,15 9,50	-39,72 -41,06 7,16	-5,99 -6,82 9,84	
Industri Pengolahan	6,96	-8,10	0,48	3,80	-10,23	
Pengadaan Listrik dan Gas	7,72	7,18	5,62	5,64	10,17	
Pengadaaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,41	5,53	5,93	4,90	9,87	
Konstruksi	6,52	8,62	6,99	4,50	14,46	
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,60	7,94	7,77	6,32	7,21	
Transportasi dan Pergudangan	7,25	7,79	2,74	3,72	4,79	
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,01	9,81	9,72	6,76	9,73	
Informasi dan Komunikasi	9,23	9,44	9,48	2,73	5,72	
Jasa Keuangan dan Asuransi	-5,98	1,42	-5,72	1,36	6,20	
Real Estate	3,89	7,51	7,64	6,36	9,44	
Jasa Perusahaan	1,67	5,90	7,45	2,15	5,60	
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	2,67	8,07	4,28	7,93	11,67	

SEKTOR	CAPAIAN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jasa Pendidikan	6,27	6,83	5,74	8,84	10,13
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13,02	9,50	8,34	7,80	10,21
Jasa Lainnya	4,63	6,30	6,00	3,92	10,24
PDRB (Non Migas)	5,38	3,30	4,18	4,65	3,27
PDRB (Migas)	1,59	-1,74	-3,59	-11,53	-0,89

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016

Tabel 2.4

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Aceh Utara Atas Dasar Harga Berlaku

Menurut Lapangan Usaha Tahun2012-2016 (Persen)

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
Α	Pertanian	19,83	21,25	23,77	31,22	32,75
	Pertanian, peternakan,     perburuan dan jasa pertanian	14,06	15,01	17,18	22,43	23,36
	Kehutanan dan penebangan kayu	0,30	0,33	0,35	0,43	0,44
	3. Perikanan	5,47	5,92	6,24	8,37	8,96
В	Pertambangan dan Penggalian	43,87	41,80	36,74	17,01	14,90
	Pertambangan Migas dan     Panas Bumi	43,13	40,91	35,74	15,67	13,44
	Pertambangan dan     penggalian lainnya	0,74	0,85	1,00	1,34	1,46

NO	LAPANGAN USAHA			TAHUN		
	LAI AITOAIT OOAIIA	2012	2013	2014	2015	2016
С	Industri Pengolahan	14,61	13,27	13,52	17,21	14,30
D	Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,07	0,08
Е	Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
F	Konstruksi	2,78	3,06	3,41	4,51	5,21
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,99	7,65	8,34	11,19	12,33
Н	Transportasi dan Pergudangan	3,87	4,27	4,55	5,79	5,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,24	0,27	0,31	0,42	0,47
J	Informasi dan Komunikasi	1,12	1,22	1,35	1,70	1,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,01	1,04	1,05	1,36	1,45
L	Real Estate	1,44	1,61	1,82	2,44	2,69
M,N	Jasa Perusahaan	0,19	0,20	0,22	0,29	0,30
0	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	1,50	1,58	1,83	2,60	3,02
Р	Jasa Pendidikan	0,79	0,84	0,92	1,32	1,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,13	1,25	1,40	1,93	2,18
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,58	0,62	0,68	0,91	1,04
PDRB tan	pa Migas	11,22	11,85	12,81	13,77	14,48
PDRB der	ngan Migas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara

#### II.1.3 Latar Belakang Budaya

#### II.1.3.1 Corak Utama

Corak Utama Budaya Aceh Utara adalah Budaya Aceh, yang sangat memegang teguh nilai-nilai agama Islam . Budaya bersandikan syara' dan syara' bersandikan Kitabullah (Al-Qur'anul Karim). Semua objek kebudayaan bersandarkan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Kepercayaan-kepercayaan masyarakat pra-Islam, semuanya telah mengalami akulturasi dengan ajaran Islam, sehingga tidak bertentangan dengan Aqidah. Setiap prosesi budaya, selalu disertai dengan doa dan permohonan kepada Allah SWT agar sesuatu yang dilaksanakan mendapat keridhaan dan keberkahan dari-Nya.

Budaya Aceh dalam kompleksitasnya terdiri dari; adat istiadat, Sejarah dan Kesenian. Dari tampilan adat Istiadat, dikenal dengan 3 kelompok adat yaitu; Adat Perkawinan, Adat Berusaha dan Adat Kematian.

#### Adat Perkawinan

Prosesi Adat Perkawinan, diawali dengan silaturrahmi keluarga calon mempelai, dilanjutkan dengan meminang, pernikahan dan resepsi pernikahan . Rangkaian adat peerkawinan tidak hanya terhenti pada acara resepsi yang dilaksanakan di rumah mempelai perempuan (Preh Linto baro), tetapi dilanjutkan dengan acara resepsi dirumah mempelai laki-laki (tueng dara baroe), ketika mempelai perempuan mengandung, diadakan acara syukuran pada 7 bulan kehamilan yang disebut dengan 'Peusijuek Lueng". Pada 7 hari kelahiran bayi dilakukan adat Hakikah yang dilanjutkan pada 44 hari kelahiran dengan ritual 'Peucicap" dan 'Peurateb Aneuk" *Adat Berusaha* 

Stiap memulai satu usaha baik dibidang pertanian, Kehutanan, Kelautan dan usaha jual beli selalu dimulai dengan prosesi adat seperti Adat Khanduri Blang (turun kesawah), Khanduri Laot (berusaha dilaut), Khanduri Uteun ( berusaha di hutan) dan usaha jual beli (adat Hareukat)

## Adat Kematian

Adat Kematian merupakan serangkaian acara adat yang dilakukan setelah seseorang meninggal dunia, maka pihak keluarganya/ahli waris dan kerabatnya melaksanakan doa dersama/tahlilan yang mulai sejak hari pertama dikebumikan sampai hari ketujuh (Seunujoh), dilanjutkan dengan hari kesepuluh, tiga puluh,

empat puluh empat, seratus dan setahun. Pada hari-hari tersebut pihak keluarga menyediakan alakadar makanan bagi tamu yang berkunjung

Selain kelompok adat diatas, dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh Utara tentunya ada perselisihan baik didalam keluarga, sesama tetangga bahkan dengan desa lain, maka sebelum diadakan peradilan adat secara hukum negara terlebih dahulu diadakan perdamaian yang disebut dengan adat "Peudamee Ureung"

Kompleksitas yang kedua adalah seni. mMasyarakat Aceh Utara memiliki bebrapa karya seni antara lain; seni tari, musik, suara, Sastra dan Teater. Kelompok seni tari seperti tari Seudati, Ranub Lampuan, Top Pade, Treun U laot, Ratoh Jaroe dan Poh Kipah. ekspresi musik seperti Rapai Urueh, Alee Tunyang, Canang Ceureukeh dan kolaborasi beberapa alat musik yang dilengkapi dengan bunyian Seurune Kalee, genderang Aceh telah menginspirasi seniman untuk berkarya seperti Hikayat Bumoe, Bomue Lam Bala.

Nuansa Islami juga terlihat pada ornamen bangunan yang mmereplik ornamen dari nisan para raja dan petinggi Kerajaan Islam Samudra Pasai yang sangat indah, unik dan spesifik. Gaya bangunan berkubah kita temui di gedunggedung pemerintah dan sarana ibadah.

Dari sisi sejarah, Aceh Utara dikenal dengan sebutan "Bumo Pasee" (Bumi Pasai), dikarenakan pada abad XIII, berdiri sebuah kerajaan yang termasuk delapan kerajaan Islam terkenal di Dunia. Kerajaan tersebut beranama Kerajaan Islam Samudra Pasai dengan rajanya yang pertama adalah Meurah Silu yang bergelar Sultan Malik-Ash Shaleh (Malikussaleh). Kerajaan ini pernah berperan sebagai pusat kegiatan politik, ekonomi, perdagangan dan penyiaran agama Islam ke Nusantara bahkan Asia Tenggara, hal ini terbukti dengan adanya peninggalan kepurbakalaan berupa situs makam dan artefak lainnya. Peninggalan yang sekarang masih terlihat dan dapat disaksikan adalah makam Kesultanan dan ulama dengan nisan terbuat dari pualam, dihiasi ornament dan kaligrafi yang bertuliskan ayat-ayat suci Al Quran serta peringatan-peringatan kepada manusia yang hidup dimuka bumi ini. Pada

masa itu juga dikenal Dirham yang merupakan mata uang emas pertama yang digunakan untuk kegiatan jual beli.

#### .II.1.3.2 Keragaman Budaya

Kosmopolitanisme masyarakat Samudra Pasai pada masa sejarah telah mewariskan seni budaya dan adat istiadat yang multi-cultural bagi masyarakat Aceh Utara saat ini, misalnya seperti seni musik dan prosesi adat istiadat.

Alat musik khas Samudra Pasai yaitu "Rapai Pasee: berasal dari Arab dengan sebutan dufan yang dibawa oleh Syekh Abdul Kadir Jailani, alat musik ini berkembang di Aceh Utara dan hampir seluruh masyarakat Aceh Utara yang dewasa bisa memainkannya. Demikian juga dengan ornamen samudra Pasai yang merupakan sistem seni yang berasal dari Arab, Persia, India, Rum dan lokal. Sistem seni ukir Aceh Utara yang dominan dengan kaligrafi, geometrik dan arabesque juga menunjukkan betapa kuatnya kosmopolitan Masyarakat Aceh Utara.

Kehadiran masyarakat dari pulau Jawa melalui program Transmigrasi, ikut memberi nuansa ragam budaya di Aceh Utara. Kekayaan gas alam Aceh Utara telah menghadirkan Proyek-proyek vital yang mendatangkan pekerja-pekerja dari luar Aceh yang juga ikut berkontribusi pada keragaman budaya Aceh Utara, namun tidak terlepas dari nilai-nilai agama, dan tatacara berkehidupan masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### II.1.4 Sejarah

#### II.1.4.1 Sejarah Singkat Budaya

Aceh Utara dikenal dengan sebutan "Bumo Pasee" (Bumi Pasai), dikarenakan pada abad XIII, berdiri sebuah kerajaan yang termasuk delapan kerajaan Islam terkenal di Dunia. Kerajaan tersebut beranama "Kerajaan Islam Samudra Pasai" dengan rajanya yang pertama adalah Meurah Silu yang bergelar Sultan Malik-Ash Shaleh (Malikussaleh). Kerajaan ini pernah berperan sebagai pusat kegiatan politik, ekonomi, perdagangan dan penyiaran agama Islam ke Nusantara

bahkan Asia Tenggara, hal ini terbukti dengan adanya peninggalan kepurbakalaan berupa situs makam dan artefak lainnya. Peninggalan yang sekarang masih terlihat dan dapat disaksikan adalah makam Kesultanan dan ulama dengan nisan terbuat dari pualam, dihiasi ornament dan kaligrafi yang bertuliskan ayat-ayat suci Al Quran serta peringatan-peringatan kepada manusia yang hidup dimuka bumi ini. Pada masa itu juga dikenal Dirham yang merupakan mata uang emas pertama yang digunakan untuk kegiatan jual beli.

Hakikatnya, wilayah kesultanan Samudra Pasai terbentang luas melampaui Aceh Utara hari ini, situs pemakaman dan nisan-nisan bersurat mereka tersebar diseluruh Aceh Utara.

Dalam merumuskan hari jadi Aceh Utara, Pemerintah Aceh Utara memutuskan berdasarkan sejarah berdiri dan jayanya kesultanan Samudera Pasai. Tersebut beberapa nama antara lain; Sultan Ibnu Mahmud sekitar 622 H, Sultan Malikussaleh 686 H dan Sultanah Nahrisah 831 H adalah



pemuka kesultanan Samudra Pasai yang paling menginspirasi Aceh Utara saat ini. Demikian juga kejayaan peradaban, kebudayaan dan adat Istiadat Samudra Pasai itu dianggap sebagai bagian penting dari kekayaan kebudayaan dan adat istiadat Aceh Utara saat ini.

Karena lamanya sejarah keislaman dan peradaban di Samudera Pasai. Maka saat ini Aceh Utara mengawariskan budaya yang sangat luhur dan tradisi yang sangat terpuji sebagai peninggalan dari kejayaan Samudra Pasai. Peninggalan-peninggalan berupa artefact, seperti mata uang, keramik,



senjata siwah dan lainnya, tulisankaligrafi Arabdan ornamen-ornamen yang ada pada batu Nisan menjadi sumber informasi yang luar biasa tentang sejarah peradaban, budaya dan adat Aceh Utara. Selain itu, Samudera Pasai meninggalkan manuskrip dan literatur Islam yang sangat penting sebagai khazanah budaya Islam, baik berkaitan dengan ilmu-ilmu keagamaan dan sosial, juga ilmu alam dan science.

## II.1.4.2 Sejarah Singkat Wilayah Administratif

Berawal dari Sejarah perkembangan Islam di pesisir (Kerajaan Islam Samudra Pasai) tepatnya terletak di Kecamatan Samudera Geudong yang merupakan tempat pertama kehadiran Agama Islam di kawasan Asia Tenggara. Kerajaan-kerajaan Islam di Aceh mengalami pasang surut, mulai

dari zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kedatangan Portugis ke Malaka pada tahun 1511, dimana 10 tahun kemudian Samudera Pasai turut diduduki, hingga masa penjajahan Belanda.

Secara de facto Belanda menguasai Aceh pada tahun 1904, yaitu ketika Belanda dapat menguasai benteng pertahanan terakhir pejuang Aceh Kuta Glee di Batee Iliek, Samalanga. Dengan surat Keputusan Vander Geuvemement General Van Nederland Indie tanggal 7 September 1934, Pemerintah Hindia Belanda membagi Daerah Aceh atas 6 (enam) Afdeeling (Kabupaten) yang dipimpin seorang Asistent Resident, salah satunya adalah Affleefing Noord Kust Van Aceh (Kabupaten Aceh Utara) yang meliputi Aceh Utara sekarang ditambah Kecamatan Bandar Dua yang kini telah termasuk Kabupaten Pidie (*Monografi Aceh Utara tahun 1986, BPS dan BAPPEDA Aceh Utara*).

Afdeeling Noord Kust Aceh dibagi dalam 3 (tiga) Onder Afdeeling (Kewedanaan) yang dikepalai seorang Countroleur (Wedana) yaitu :

- 1. Onder Afdeeling Bireuen
- 2. Onder Afdeeling Lhokseumawe
- 3. Onder Afdeeling Lhoksukon

Selain Onder Afdeeling tersebut terdapat juga beberapa Daerah Ulee Balang (Zelf Bestuur) yang dapat memerintah sendiri terhadap daerah dan rakyatnya yaitu Wee Balang Keuretoe, Geurogok, Jeumpa, dan Peusangan yang diketuai oleh Ampon Chik.

Pada masa pendudukan Jepang istilah Afdeeling diganti dengan Bun, Onder Afdeeling disebut Gun, Zelf Bestuur disebut Sun, Mukim disebut Kun dan Gampong disebut Kumi. Sesudah Indonesia diproklamirkan sebagai Negara Merdeka, Aceh Utara disebut Luhak yang dikepalai oleh seorang Kepala Luhak sampai dengan tahun 1949. Melalui Konfrensi Meja Bundar, pada 27 Desember 1949 Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari beberapa negara bagian. Salah satunya adalah Negara Bagian Sumatera Timur. Tokoh-tokoh Aceh

saat itu tidak mengakui dan tidak tunduk pada RIS tetapi tetap tunduk pada Negara Republik Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Republik Indonesia Serikat kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berlaku Undang Undang Sementara 1950 seluruh negara bagian bergabung dan statusnya berubah menjadi propinsi. Aceh yang pada saat itu bukan negara bagian, digabungkan dengan Propinsi Sumatera Utara. Dengan Undang Undang Darurat Nomor 7 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom setingkat Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, terbentuklah Daerah Tingkat II Aceh Utara yang juga termasuk

Keberadaan Aceh di bawah Propinsi Sumatera Utara menimbulkan rasa tidak puas pada para tokoh Aceh yang menuntut agar Aceh tetap berdiri sendiri sebagai propinsi dan tidak berada di bawah Sumatera Utara. Tetapi ide ini kurang didukung oleh sebagian masyarakat Aceh terutama yang berada di luar Aceh. Keadaan ini menimbulkan kemarahan tokoh Aceh dan memicu terjadinya pemberontakan DI/TII pada tahun 1953. Pemberontakan ini baru padam setelah datang Wakil Perdana Menteri Mr Hardi ke Aceh yang dikenal dengan Missi Hardi dan kemudian menghasilkan Daerah Istimewa Aceh. Dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor I/ Missi / 1957, lahirlah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan sendirinya Kabupaten Aceh Utara masuk dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Berdasarkan Undang Undang Nomor I tahun 1957 dan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 1959.

Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara terbagi dalam 3 (tiga) Kewedanaan yaitu :

- 1. Kewedanaan Bireuen terdiri atas 7 kecamatan
- 2. Kewedanan Lhokseumawe terdiri atas 8 Kecamatan
- 3. Kewedanaan Lhoksukon terdiri atas 8 kecamatan

Dua tahun kemudian keluar Undang Undang Nomor 18 tahun 1959 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Berdasarkan UU tersebut wilayah kewedanaan dihapuskan dan wilayah kecamatan langsung di bawah Kabupaten Daerah Tingkat II. Dengan surat keputusan Gubemur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 07 / SK / 11 / Des/ 1969 tanggal 6 Juni 1969, wilayah bekas kewedanaan Bireuen ditetapkan menjadi daerah perwakilan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara yang dikepalai seorang kepala perwakilan yang kini sudah menjadi Kabupaten Bireun.

Hampir dua dasawarsa kemudian dikeluarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, sebutan Kepala Perwakilan diganti dengan Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II, sehingga daerah perwakilan Bireuen berubah menjadi Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Utara di Bireuen.

Dengan berkembangnya Kabupaten Aceh Utara yang makin pesat, pada tahun 1986 dibentuklah Kotif (Kota Administratif) Lhokseumawe dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1986 yang membawahi 5 kecamatan. Dan berdasarkan Kep Mendagri Nomor 136.21-526 tanggal 24 Juni 1988 tentang pembentukan wilayah kerja pembantu Bupati Pidie dan Pembantu Bupati Aceh Utara dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, maka terbentuklah Pembantu Bupati Aceh Utara di Lhoksukon, sehingga pada saat ini Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 2 Pembantu Bupati, 1 kota administratip, 26 wilayah kecamatan yaitu 23 kecamatan yang sudah ada ditambah dengan 3 kecamatan pemekaran baru. Sebagai penjabaran dari UU nomor 5 tahun 1974 pasal 11 yang menegaskan bahwa titik berat otonomi daerah diletakkan pada daerah tingkat II maka pernerintah melaksanakan proyek percontohan otonomi daerah. Aceh Utara ditunjuk sebagai daerah tingkat II percontohan otonomi daerah.

Pada tahun 1999 Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari 26 Kecamatan dimekarkan lagi menjadi 30 kecamatan dengan menambah empat kecamatan baru berdasarkan PP Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999.Seiring dengan pemekaran kecamatan baru tersebut, Aceh Utara harus merelakan hampir sepertiga wilayahnya untuk menjadi kabupaten baru, yaitu

Kabuparten Bireuen berdasarkan Undang Undang nomor 48 tahun 1999. Wilayahnya mencakup bekas wilayah Pembantu Bupati di Bireuen.

Kemudian pada Oktober 2001, tiga kecamatan dalam wilayah Aceh Utara, yaitu Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Blang Mangat dijadikan Kota Lhokseumawe. Saat ini Kabupaten Aceh Utara dengan luas wilayah sebesar 3.296,86 Km2 dan berpenduduk sebanyak 541.878 jiwa dalam 27 kecamatan.

## I.1.5 Peraturan Tingkat Daerah Terkait Kebudayaan

## II.1.5.1 Peraturan Yang Berlaku

Ada beberapa regulasi daerah yang berkaitan dengan Kebudayaan antara lain:

- Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2012 tanggal 12 Mei
   20012 Tentang Tata Kerja Tuha Peut dalam Kabupaten Aceh Utara
- Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Gampong.
- Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Utara
- Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Adat dan Adat Istiadat.

#### II.1.5.2 Peraturan yang Pernah Ada dan Tidak Berlaku

Untuk kesemua regulasi yang telah diterbitkan, masih berlaku hingga saat ini. Oleh sebab itu tidak ada peraturan yang pernah ada tetapi tidak diberlakukan lagi

## II.2 Ringkasan Proses Penyusunan PPKD

Usai Lokakarya Penyusunan Pokok-pokok Pikiran Daerah (PPKD) yang dilaksanakan di Ibu Kota Provinsi Aceh (Banda Aceh) tertanggal 10 April 2018, Pemda Kabupaten Aceh Utara baru memulai mengidentifikasi pihak-pihak yang berkompeten yang akan ditunjuk sebagai Ketua dan Anggota Tim Penyusun PPKD Kabupaten Aceh Utara.

## II.2.1 Tim Penyusun

Tim Penyusun PPKD Kabupaten Aceh Utara terdiri dari berbagai unsur antara lain; Budayawan, Tokoh Adat, Seniman dan Akademisi yang ditunjuk melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Utara Nomor 430/421/2018 Tanggal 7 September 2018 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara terdiri dari unsur Pemmerintah Daerah, Budayawan yang berada di lembaga Majelis Adat Aceh, Seniman yang bergabung dalam Dewan Kesenian Aceh serta Akademisi (SK terlampir)

#### II.2.2 Proses Pendataan

Setelah terbentuknya Tim Penyusun PPKD Kabupaten Aceh Utara maka kegiatan awal yang dilakukan oleh Tim tersebut adalah proses pengumpulan data dari 11 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dengan menggunakan borang isian dari Kemendikbud. Melalui pertemuan pertama yang langsung dipimpin oleh Ketua Tim dan dihadiri oleh seluruh keanggotaan Tim. Pada pertemuan ini Tim telah menyelesaikan pengisian Borang PPKD untuk 4 OPK yaitu Manuskrip, Adat Istiadat, Kesenian dan Cagar Budaya.

Pada pertemuan kedua, Tim menyelesaikan pengisian Borang PPKD untuk 4 OPK yaitu; Tradisi Lisan, Ritus, Pengetahuan Tradisional dan Teknologi Tradisional, pertemuan ini dipimpin oleh Sekretaris Tim dan dihadiri oleh anggota tim dari unsur Budayawan dan Tokoh Adat. Untuk menyelesaikan pengisian keseluruhan OPK dilakukan pertemuan ketiga untuk mengisi borang OPK Bahasa,Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional. Kesemua iisian borang tersebut diimput oleh operator PPKD dalam sistem APIK.

#### II.2.3 Proses Penyusunan Masalah dan Rekomendasi

Kegiatan lanjutan adalah penyusunan masalah dan rekomendasi OPK. Kegiatan ini ditindaklanjuti melalui Forum Group Diskusi (FGD). Pada pelaksanaan FGD yang pertama, kami didampingi oleh Tim Pendampingan PPKD dari Dirjenbud (M.Haves Gumai, SH. MH dan Sumari) dengan dihadiri oleh keanggotaan Tim dari unsur Budayawan, Seniman dan Bappeda Aceh

Utara, telah merumuskan permasalahan dan rekomendasi untuk OPK Manuskrip, Adat Istiadat, Kesenian dan Cagar Budaya. FGD berikutnya merumuskan permasalahan dan rekomendasi untuk OPK Bahasa, Tradisi Lisan, Ritus, Pengetahuan Tradisional, Tekhnologi Tradisional, Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional.

Data yang telah terhimpun baik dalam bentuk isian borang dan tabel yang telah diimput oleh operator dilengkapi dengan naratif yang sistematika penulisannya merujuk kepada outline yang telah disusun.

#### II.2.4 Catatan Evaluasi atas Proses Penyusunan

Selama Proses penyusunan PPKD Kabupaten Aceh Utara, ada hal yang menjadi catatan evaluasi yaitu :

- Waktu yang singkat untuk penyelesaian penyusunan PPKD, sehingga data tentang OPK tidak maksimal diperoleh.
- Kegiatan Penyusunan PPKD tidak diawali dengan perencanaan alokasi anggaran, sehingga Daerah tidak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan ini.
- Penjadwalan kegiatan pertemuan harus mengakomodir jadwal kegiatankegiatan dari keanggotaan Tim yang juga sangat sibuk.

# BAB III LEMBAGA PENDIDIKAN BIDANG KEBUDAYAAN

## III.1 Lembaga Pendidikan Menengah Bidang Kebudayaan

Kabupaten Aceh Utara Meliki beberapa lembaga pendidikan menengah yang berhubungan dengan bidang kebudayaan yaitu :

Tabel 3.1 Lembaga Pendidikan Menengah Bidang Kebudayaan di Kabupaten Aceh Utara

Nama Sekolah	Alamat	Jurusan
SMKN 1 Baktiya Barat	Jl. Buah No. 102 Kec Baktiya Barat	Tata Busana
SMKN 1 Muara Batu	Jl. PLTD Cot Murong Kec. Muara Batu	Teknik Penangkapan Ikan
SMKN 1 Lhoksukon	Jl. Banda Aceh -Medan Km 307 Alue Buket Kec. Lhoksukon	Pertanian

## III.2 Lembaga Pendidikan Tinggi Bidang Kebudayaan

Tabel 3.2 Lembaga Pendidikan Tinggi Bidang Kebudayaan di Kabupaten Aceh Utara

Nama Perguruan Tinggi	Alamat	Fakultas	Jurusan/ Program Studi
Universits Malikussaleh	Jl. Cot Tengku Nie, Reuleut Kecamatan	Teknik	Teknik Arsitektur (S1)
	Muara Batu	Pertanian	Agroekoteknologi (S1 dan S2)
		Ekonomi dan Bisnis	Ekonomi Islam (S1)
		Keguruan & Ilmu Pendidikan	Bahasa dan Sastra Indonesia (S1)

## BAB IV DATA OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

## IV. 1 Manuskrip

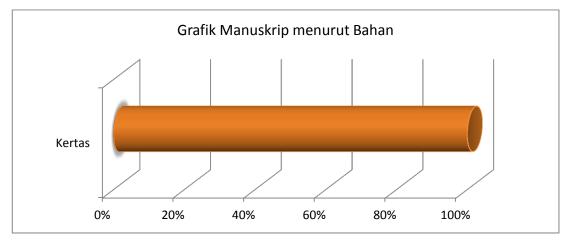
Di Kabupaten Aceh Utara tercatat memiliki beberapa Manuskri yang ditulis dalam 7 (tujuh) bahasa, yaitu; bahasa Melayu Jawi, bahasa Arab (karangan lokal), bahasa Persia dan India, bahasa Arab, bahasa Aceh, bahasa Arab dan Aceh serta bahasa Arab dan Melayu. Persentase terbesar adalah bahasa Melayu Jawi (52%), seperti yang ditampilkan oleh diagram berikut:

Diagram Manuskrip menurut Bahasa

Melayu Jawi
Arab Karangan Lokal
Persia India
Arab
Arab dan Aceh
Arab dan Melayu
Aceh

Gambar 1.1

# Kesemua Manuskrip yang ada di Aceh Utara berbahan kertas Gambar 1.2



#### IV. 2 Tradisi Lisan

Ada bbeberapa jenis Tradisi Lisan di Aceh Utara yaitu; Berbalas Pantun, Cerita Rakyat, lawak, Teka-teki dan jenis lainnya. Persentase jenis tradisi lisan terbanyak adalah jenis lainnya sebesar 40%, jenis lainnya seperti lantunan selawat, syair-syair keagamaan yang sering dilaksanakan pada acara keagaman.

Teka teki
Lawak
berbalas pantun
Cerita rakyat
Lain lain
0
1
2
4
Lain lain; 4

Gambar 2.1
Tradisi Lisan Menurut Jenis

Berdasarkan Frekwensi penuturannya sejumlah 45 % sering dituturkan. dikarenakan Tradisi lisan sering digunakan pada rangkaian prosesi adat perkawinan dan keagamaan.



Tabel 2.2

### IV. 3 Adat Istiadat

Hasil penelusuran Tim PPKD Aceh Utara, terdapat 4 jenis adat yaitu; Adat Perkawinan, Adat Perayaan, Adat Hubungan Sosial dan Adat Kematian. Jenis Adat Perkawinan, hubungan sosial dan perayaan merupakan merupakan jenis adat yang mmemiliki persentase yang besar.

Grafik 3.1

Adat Istiadat Menurut Jenis

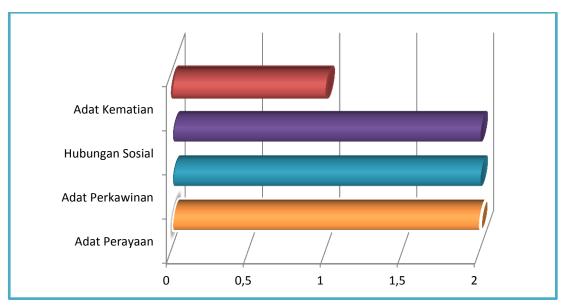
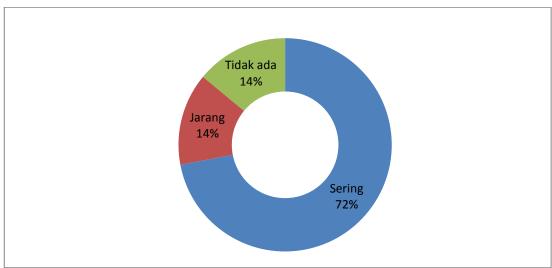


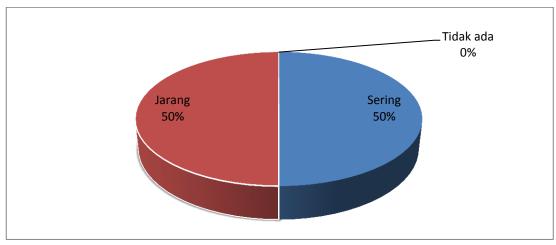
Diagram 3.2 Adat Istiadat Menurut Frekwensi Pelaksanaannya



#### IV. 4 Ritus

Hasil penelusuran terhadap OPK Ritus, terdapat jumlah yang sama antara Ritus yang sering dikerjakan dan yang jarang dikerjakan yaitu 50%

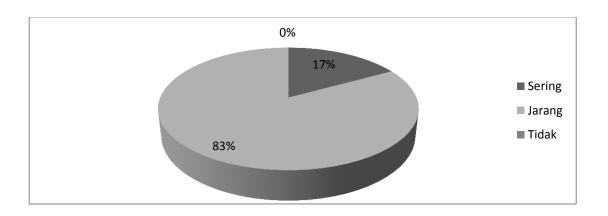
Diagram 4.1 Ritus Menurut Frekwensi Pelaksanaannya

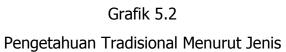


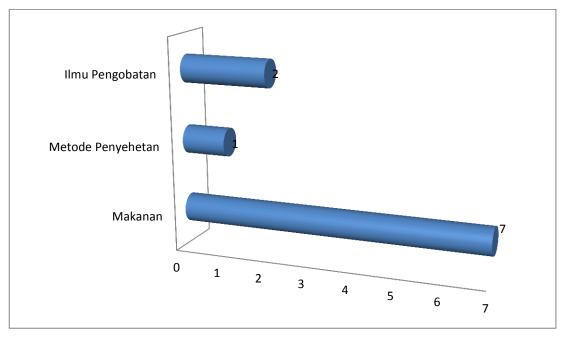
#### IV. 5 Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan tradisional jarang digunakan, terlihat pada diagram sebesar 83% hal ini dikarenakan tidak adanya regenerasi tentang pengetahuan tradisional dan tidak adanya catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap tentang OPK ini

Diagram 5.1
Pengetahuan Tradisional Menurut Frekwensi Penggunaannya





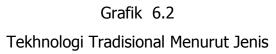


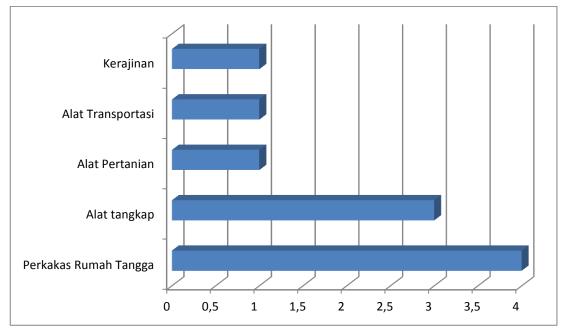
# IV. 6 Teknologi Tradisional

OPK Tekhnologi Tradisional masih sering digunakan, tetapi hanya 50% dari keseluruhan OPK

Diagram 6.1





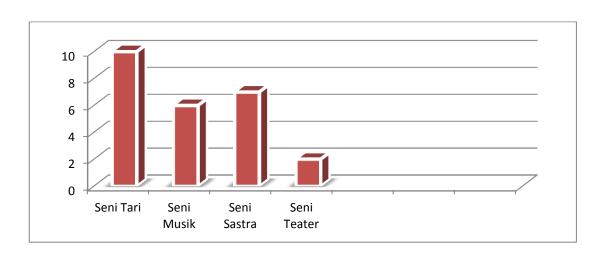


Jenis Tekhnologi Tradisional yang banyak dipergunakan adalah perkakas(peralatan) rymah tangga

### IV. 7 Seni

Seni Tari merupakan cabang seni yang banyak dilakoni di Kabupaten Aceh Utara menyusul seni sastra

Grafik 7.1
Grafik Seni Menurut Cabang Seni



#### IV. 8 Bahasa

Didalam kehidupan masyarakat Aceh Utara dikenal adanya 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Aceh dan Melayu Pasee. Bahasa Aceh Masih ditusurkan sedangakan bahsa Melayu Pase tidak pernah dituturkan lagi. oleh sebab itu persentasenya berimbang. Hilangnya penuturan dengan bahasa Melayu Pase dikarenakan pada masa penjajahan dilarang menggunakan bahasa ini (bahasa pribumi), dimana semua penyebutan harus menggunakan bahasa Belanda.

Grafik 8.1 Bahasa Menurut Status Penggunaan



### IV. 9 Permainan Rakyat

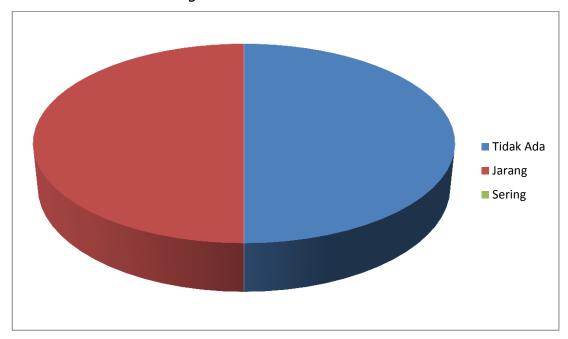
Banyak permainan rakyat yang sudah tidak dimainkan lagi, tercatat sejumlah 64%.

Diagram 9.1 Permainan Rakyat Menurut Frekwensi



## IV. 10 Olahraga Tradiisional

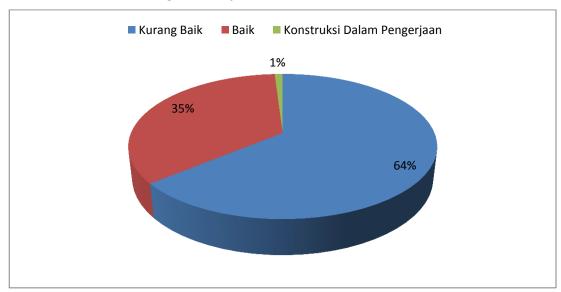
Diagram 10.1
Olahraga Tradisional Menurut Frekwensi

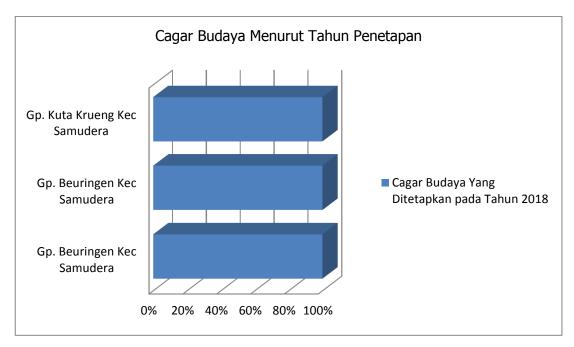


IV. 11 Cagar Budaya

Sebahagian besar Cagar Budaya di Aceh Utara dalam kondisi kurang baik, dari sejumlah 86 OPK Cagar Budaya, hanya 35% dalam keadaan baik,

Diagram 11.1 Cagar Budaya Menurut Kondisi Aktual





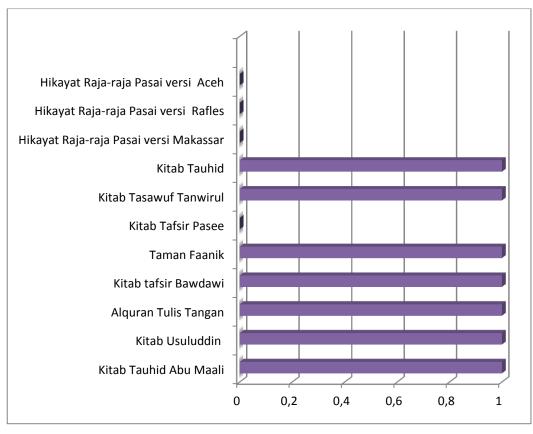
Hanya 3 (tiga) Cagar Budaya yang telah ditetapkan pada Tahun 2018, hal ini dikarenakan tidak adanya Tim Ahli Cagar Budaya yang bersertifikat yang diperbolehkan memberi rekomendasi penetapan Cagar Budaya

# BAB V DATA SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN

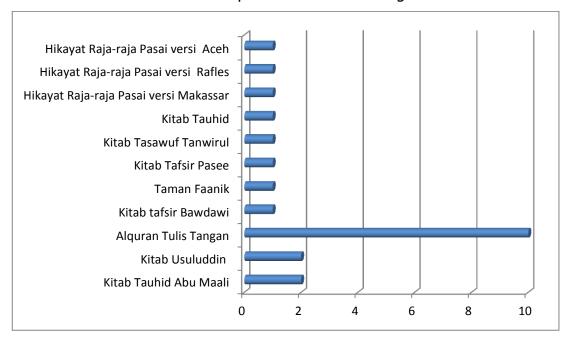
### V. 1 Manuskrip

Jumlah pengakses terbanyak terdapat di manuskrip Alquran tulisan tangan beriluminasi asli Samudra Pasai, ditunjukkan oleh grafik berikut

Gambar 5.1 Grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Manuskrip

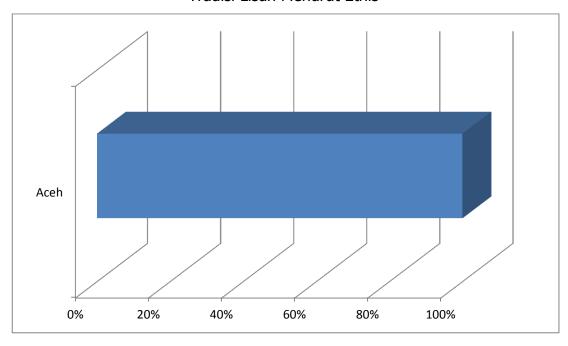


Grafik 5.2
Grafik Manuskrip Menurut Jumlah Pengakses



### V. 2 Tradisi Lisan

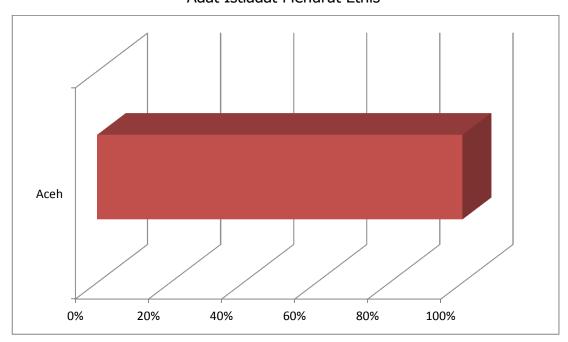
Grafik 2.1
Tradisi Lisan Menurut Etnis



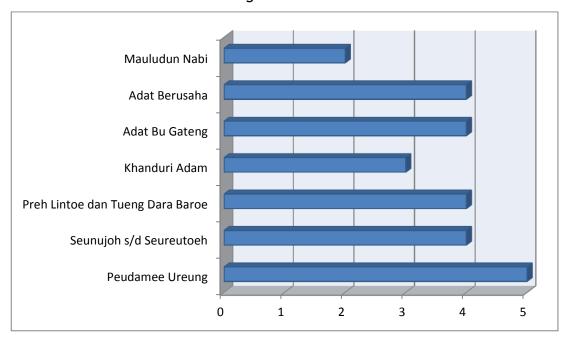
## V. 3 Adat Istiadat

Grafik 3.1

Adat Istiadat Menurut Etnis

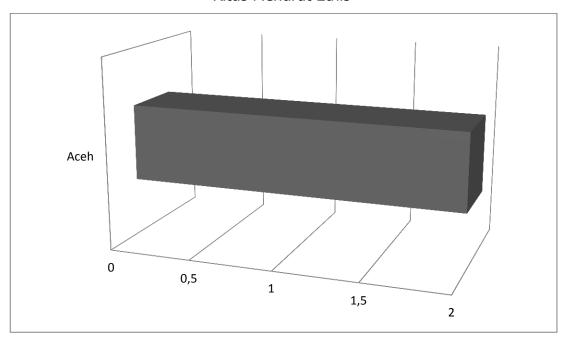


Grafik 3.4 Jumlah Lembaga Menurut Adat Istiadat



## V. 4 Ritus

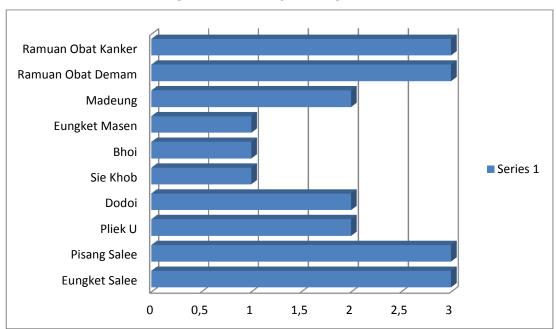
Grafik 4.1
Ritus Menurut Etnis



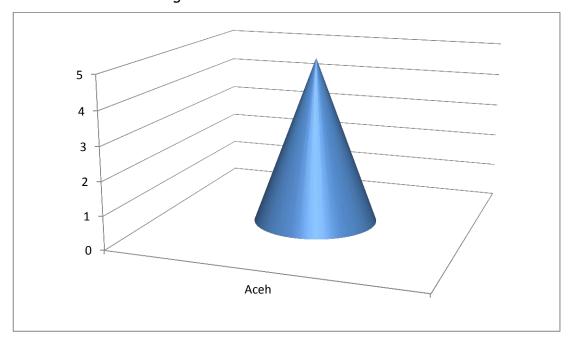
# V. 5 Pengetahuan Tradisional

Grafik 5.1

Jumlah Lembaga Menurut Objek Pengetahuan Tradisional

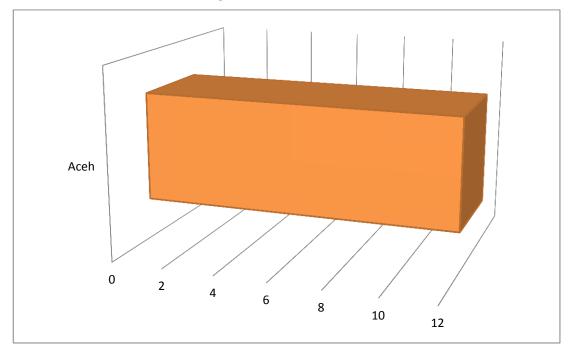


Grafik 5.2 Pengetahuan Tradisional Menurut Etnis

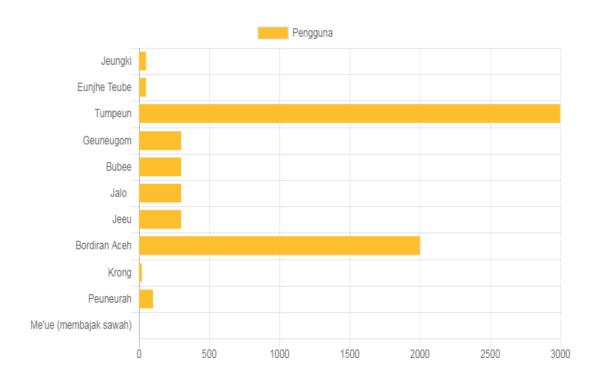


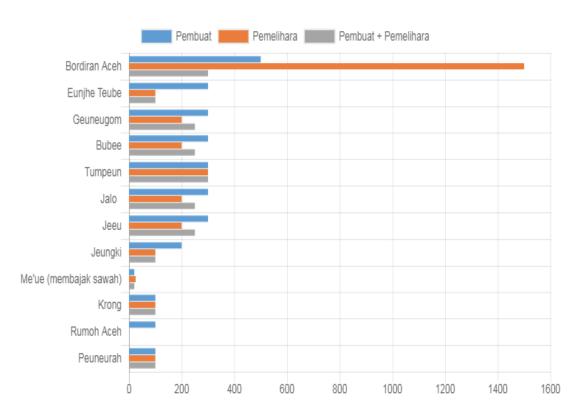
# V. 6 Tenologi Tradisional

Grafik 6.1 Tekhnologi Tradiisional Menurut Etnis



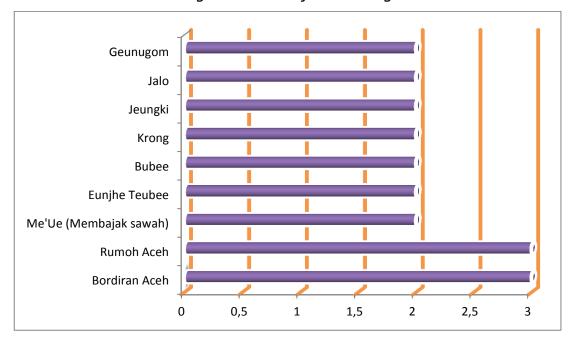
Grafik 6.2 Jumlah Pengguna Pemanfaatan Tekhologi Tradisional





Grafik 6.3

Jumlah Lembaga Menurut Objek Teknologi Tradisional



### V. 7 Seni

Grafik 7.1 Jumlah Lembaga Menurut Objek Seni

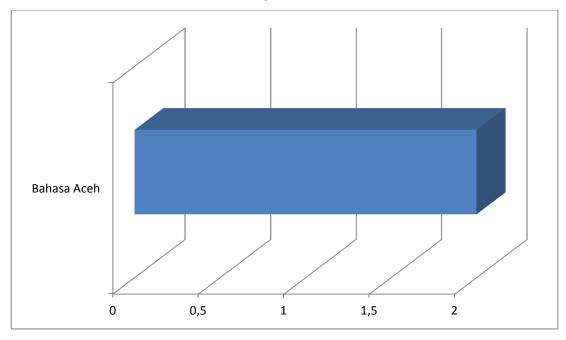


Grafik 7.2 Jumlah Pelaku Pendukung Seni Menurut Cabang Seni



### V. 8 Bahasa

\Garfik 8.1 umlah Lembaga Menurut Bahasa



# V. 9 Permainan Rakyat

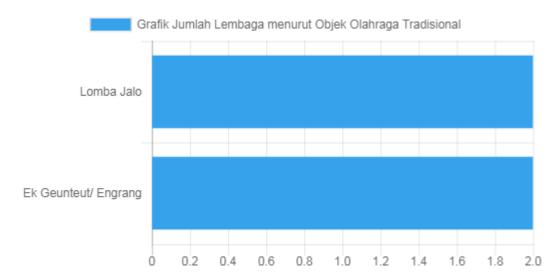
Grafik 9.1 Jumlah Lembga Menurut Objek Permainan Rakyat



## V. 10 Olahraga Tradiisional

Grafik 10.1

Jumlah Lembaga Menurut Objek Olahraga Tradisional



# V. 11 Cagar Budaya

Tabel 11.1 Jumlah Lembaga Menurut Objek Cagar Budaya

No	Nama	Jumlah Lembaga
1	Makam Tgk. Saleh Salihin	1
2	Makam Tgk. Chik Paya Bakong	1
3	Makam Tgk. Di Blang Ara	1
4	Makam Alue Kroeng	1
5	Makam Batee Balee	1
6	Makam Batee Raya	1
7	Makam Bujang Salem	1
8	Makam Cut Asiah	1
9	Makam Cut Bayan	1
10	Makam Cut Meutia	1
11	Makam Di Cot Sagirin	1
12	Makam Habib/Ibnu Mahmud	1
13	Makam Kaidafa Qaryah Asy Syarief	1
14	Makam Kaidafa Qaryah Asy Syarief	1
15	Makam Khoja Tajuddin Bin Ibrahim	1
16	Makam Kubu Tengku Tongkat Cabang	1
17	Makam Maulana Abdurrahman Al- Fasy	1
18	Makam Naina Husam Al - Din	1
19	Makam Pang Lateh Pang Naggroe	1
20	Makam Para Syuhada Cot Plieng	1
21	Makam Perdana Menteri Yakob	1
22	Makam Petua Dollah	1
23	Makam Putri Albasiah	1
24	Makam Putroe Beutom	1
25	Makam Raja Ahmad	1
26	Makam Raja Kanayan	1
27	Makam Raja Muhammad	1
28	Makam Ratu Al-Aqla (Malikah Danir)	1
29	Makam Said	1
30	Makam Said Syaref	1
31	Makam Sultan Malikudhahir	1
32	Makam Sultan Malikussaleh	1
33	Makam Sultanah Nahrasyiah	1
34	Makam Syarifah Binti Said – Muhammad dari Isfahany	1
35	Makam Syeh Ahmad	1
36	Makam Tajul Muluk	1
37	Makam Teungku Syarief ( Raja Khan)	1
38	Makam Tgk. Aji	1

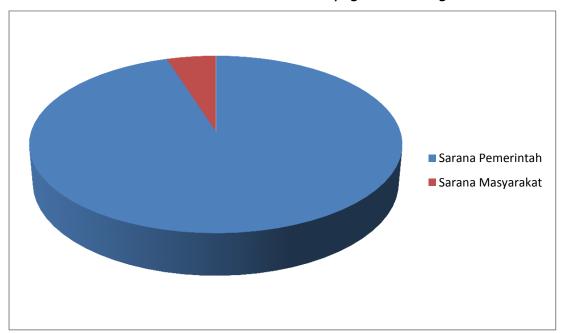
39	Makam Tgk. Batee Neurok	1
40	Makam Tgk. Batee Puteh	1
41	Makam Tgk. Batee Raya	1
42	Makam Tgk. Ben Daud	1
43	Makam Tgk. Bluka Tuan	1
44	Makam Tgk. Di Alue Leukot	1
45	Makam Tgk. Di Alue Ngom	1
46	Makam Tgk. Di Alue Serdang	1
47	Makam Tgk. Di Blang Supeng	1
48	Makam Tgk. Di Cot Kuprah	1
49	Makam Tgk. Di Kuli	1
50	Makam Tgk. Di Kuli	1
51	Makam Tgk. Di Mampre	1
52	Makam Tgk. Di Meurandeh	1
53	Makam Tgk. Di Nilam	1
54	Makam Tgk. Dimoncrang	1
55	Makam Tgk. Jrat Habib	1
56	Makam Tgk. Keubon Pirak	1
57	Makam Tgk. Lam Kuta	1
58	Makam Tgk. Lhok Euncin	1
59	Makam Tgk. Lubok KareungMakam Tgk. Lubok	1
	Kareung	
60	Makam Tgk. Maali Pasai	1
61	Makam Tgk. Muhammad Saleh/Tgk. Syik di Lapang	1
62	Makam Tgk. Mukmin	1
63	Makam Tgk. Murtadhabiddin	1
64	Makam Tgk. Pasai	1
65	Makam Tgk. Peut Ploh Peut	1
66	Makam Tgk. Sabi dan Tgk. Blang Mane	1
67	Makam Tgk. Sara Maga	1
68	Makam Tgk. Sara Maga	1
69	Makam Tgk. Sara Panyang	1
70	Makam Tgk. Sidi Abdullah Tajul Nillah	1
71	Makam Tgk. Syarief	1
72	Makam Tgk. Syeh Ibrahim	1
73	Makam Tgk. Syeh Kala Muda	1
74	Makam Tgk. Ulee Gunong	1
75	Makam Tgk. di Glumpang	1
76	Makam Wazir Al – Afdal	1
77	Makan Asyiah	1
78	Mesjid Tgk. Chik Paya Bakong	1
79	Monumen Islam Samudra Pasai	1
80	Monumen Simpang KKA	1
81	Museum Islam Samudra Pasai	1

82	Rumah Adat Cut Meutia	1
83	Rumah Tgk. Di Mancang	1
84	Tugu Bujang Salem	1
85	Tugu Para Syuhada Cot Plieng	1
86	Tugu Peringatan Pertempuran Klewang Anval	1

# BAB VI DATA SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN

## VI. 1 Manuskrip

Diagram 1,1
Persentase Sarana dan Prasarana yng mendukung Manuskrio



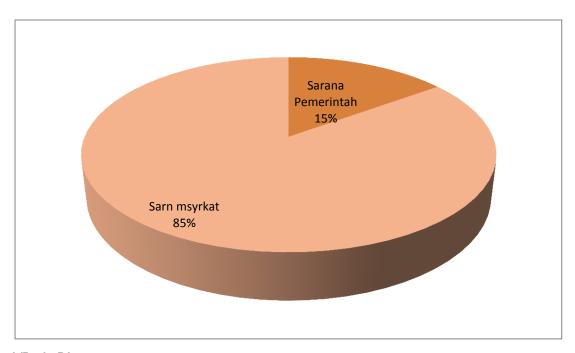
### VI. 2 Tradisi Lisan

Grafik 2.1 Tradisi Lisan Manurut Media Penyajian



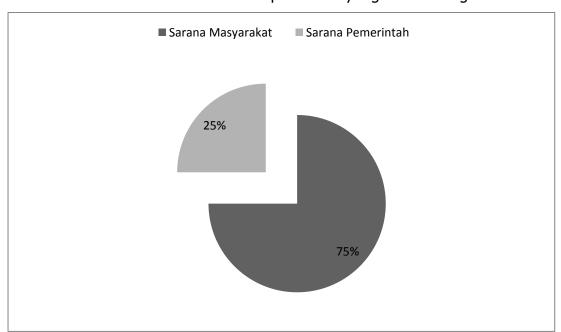
## VI. 3 Adat Istiadat

Diagram 3.1
Persentase sarana dan prasarana yang mendukung Adat Istiadat



VI. 4 Ritus

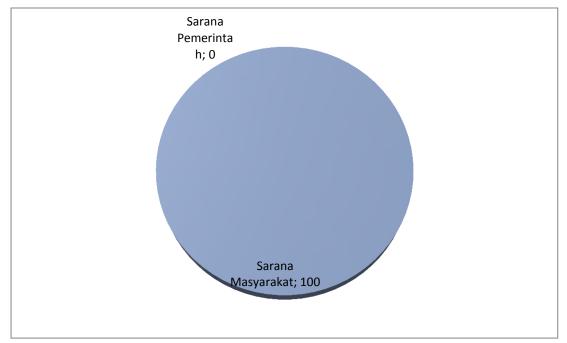
Diagram 4.1
Persentase sarana dan prasarana yang mendukung Ritus



# VI. 5 Pengetahuan Tradisional

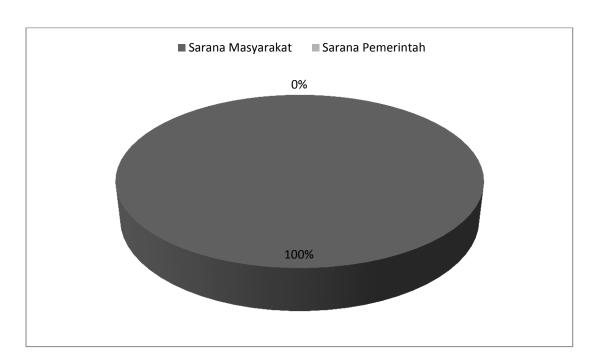
Diagram 5.1

Diagram Persentase Sarpras yang mendukung Pengetahuan Tradisional



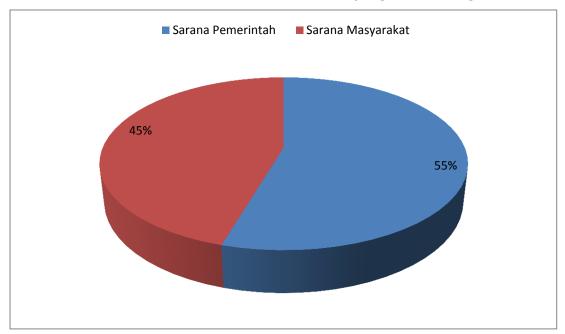
## VI. 6 Teknologi Tradisional

Diagram 6.1
Persentase Sarana dan Prasarana yang mendukung Tekhnologi Tradisional



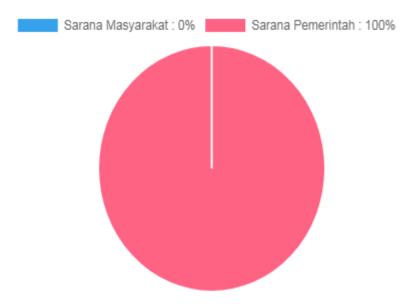
# VI. 7 Seni

Diagram 7.1
Persentase Sarana dan Prasarana yang mendukung Seni



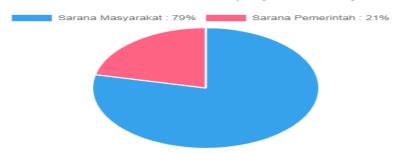
## VI. 8 Bahasa

Diagram 8.1
Persentase Sarana dan Prasarana yang mendukung OPK Bahasa



## VI. 9 Permainan Rakyat

Diagram 9.1
Persentase sarana dan Prasarana yang mendukung Permainan Rakyat



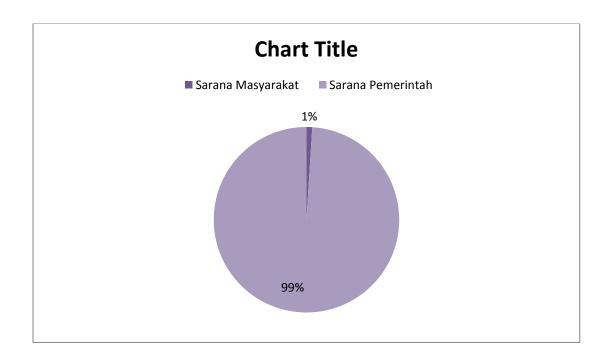
## VI. 10 Olahraga Tradiisional

Diagram 10/1

Persentase Sarana dan Prasarana yang mendukung Olahraga Tradisional

## VI. 11 Cagar Budaya

Diagram 11.1
Persentase Sarana dan Prasarana yang mendukung Cagar Budaya



#### VII.2 Upaya

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tetap berupaya menjaga dan memelihara Objek Kemajuan Kebudayaan, Pemerintah telah membangun satu Museum sebagai tempatmenyimpan Tinggalan arkeologis seperti manuskrip, Kolesi-koleksi etnograf, Numismatika yang sangat penting bagi sejarah Islam di Nusantara dan Asia Tenggara.

Untuk OPK Adat Istiadat, Pemerintah tetap melaksanakan Acara-acra keagamaan seperti Mauludan Nabi, Zikir bersama dan Tausiah yang dipusatkan di Mesjid dan lapangan terbuka. Disetiap memulai ceremunial apapun dan upacara selalu diawali dengan pembacaan ayat suci Alquran;

Pemerintah telah menjadikan Bahasa Aceh sebagai muatan lokal di sekolah dasar, hal ini dilakukan dalam rangka tetap melestarikan bahasa Aceh jangan sampai kehilangan jenis bahasa seperti bahasa Melayu Pasee yang tidak pernah dituturkan lagi dan tidak ada penuturnya.

DiAceh Utara diterapkan sistem pemerintahan adat dengan mengangkat tokohtokoh adat seperti Mukim, Tuha Peut dan Tuha lapan.

#### VII.3 Permasalahan dan Rekomendasi Umum

Pada umumnya Budaya daerah saat ini mengalami kemunduran akibat pengaruh globalisasi yang sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat yang seakan meninggalkan tatacara kehidupan yang tradisional .

Sebahagian besar objek pemajuan kebudayaan seperti Adat Istiadat, Seni, Tradisi lisan, Ritus, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, olahraga Tradisional dan permainan rakyat terkena dampak globalisasi dan modernisasi tersebut. OPK ini terlihat seperti jarang diekspresikan di masyarakat.

Kondisi manuskrip yang hampir keseluruhan, rusak serta kajian dan penelitian yang komperehensip tidak pernah dilakukan, merupakan hal yang membuat kemunduran pelaksanaan Manuskrip, sehingga tidak ada pengetahuan dan informasi yang didapat dari sebuah manuskrip, hal ini membatasi ruang gerak untuk diketahui pentingnya sejarah yang tersimpan dalam OPK tersebut.

Pasca Tsunami Aceh Tahun 2004, banyak sarana dan prasarana publik (jalan, bangunan sekolah, puskesmas) tidak dapat difungsikan lagi, sehingga Pemerintah

Kabupaten Aceh Utara harus memprioritaskan alokasi anggaran kepada pembangunan kembali sarana dan prasarana publik ini, sementara alokasi dana untuk kegiatan langsung mengenai pemajuan kebudayaan harus tertunda. Sebahagian besar cagar budaya berupa bangunan tidak dapat direvitalisasi, pembangunan sarana expresi seni dan upaya-upaya promosi budaya seakan tidak terlaksana.

Secara umum, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara merekomendasikan beberapa hal antara lain :

- Program Restorasi, Melengkapi ruang penyimpanan manuskrip dengan bahan dan peralatan yang memadai serta Pengkajian dan publikasi Manuskrip.
- Melakukan kajian untuk menyusun catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkapsetiap Objek Pemajuan Kebudayaanaceh Pasee yang ada di Aceh utara.
- Meningkatkan Kualitas dan kuantitas pelatih Seni, Juru pelihara cagar budaya, dan sertifikasi im Ahli Cagar Budaya.
- Program agenda tahunan ekspresi OPK seni, adat istiadat, tradisi lisan,
   Olahraga dan Tekhnologi Tradisional serta permainan Rakyat.
- Pengalokasian anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengelola cagar budaya.

.

BAB VII

## PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

# VII.1 Manuskrip

No	Permasalahan	Tujuan	Rekomendasi	Sasaran	Tahapan Kerja		Indikato	r Capaian	
						2024	2029	2034	2039
1	Kondisi artefak manuskrip rusak berat atau hilang.	Manuskrip yang rusak atau hilang direstorasi atau dipertahankan kondisinya sesuai dengan kebutuhan.	Program restorasi manuskrip	Kemendikbud, Disdikbud Aceh Utara	Mengumpulkan manuskrip yang ada di Aceh Utara.     Identifikasi kondisi manuskrip yang terkumpul.     Menentukan manuskrip yang direstorasi.     Pelaksanaan restorasi.      Inventarisasi kebutuhan	Semua manuskrip yang ada di museum (42 manuskrip) telah selesai direstorasi.	adanya program restorasi manuskrip berkala dengan kapasitas 3 manuskrip.	adanya program restorasi manuskrip berkala dengan kapasitas 3 manuskrip.	adanya program restorasi manuskrip berkala dengan kapasitas 3 manuskrip.
2.	Tidak ada sarana dan prasarana penyimpanan manuskrip yang ideal.	Museum manuskrip di aceh utara menjadi tempat yang ideal.	Melengkapi ruang manuskrip yang ada di aceh utara dengan peralatan lengkap.	Kemendikbud, Disbudpar Aceh, Bappeda Aceh Utara, Disdikbud Aceh Utara	ruang penyimpanan.  2. Revitalisasi ruang penyimpanan.	Ruang penyimpanan dengan kapasitas 50 manuskrip.	Ruang penyimpanan dengan kapasitas 100 manuskrip.	Ruang penyimpanan dengan kapasitas 150 manuskrip.	Ruang penyimpanan dengan kapasitas 200 manuskrip.
3.	Tidak ada program Pengkajian, penelitian dan publikasi.manu skrip secara berkala	Aceh utara memiliki program Pengkajian, penelitian dan publikasi.manu skrip secara berkala	Pengkajian, penelitian dan publikasi.	Disbudpar Aceh, Balai Arkennas, Disdikbud Aceh Utara, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dayah (Pesantren)	<ol> <li>Menentukan para pemangku kepentingan dan bentuk kerja sama</li> <li>Menentukan manuskrip yang akan dikaji dan diteliti</li> <li>Pelaksanaan pengkajian dan penelitian.</li> <li>Publikasi hasil pengkajian dan penelitian</li> </ol>	Terdapat program pengkajian , penelitian dan publikasi manuskrip dengan kapasitas 2 manuskrip pertahun.	Terdapat program pengkajian , penelitian dan publikasi manuskrip dengan kapasitas 2 manuskrip pertahun.	Terdapat program pengkajian , penelitian dan publikasi manuskrip dengan kapasitas 2 manuskrip pertahun.	Terdapat program pengkajian , penelitian dan publikasi manuskrip dengan kapasitas 2 manuskrip pertahun.

| 4. | Ada beberapa<br>manuskrip yang<br>tidak diketahui<br>keberadaan<br>artefaknya dan<br>yang<br>artefaknya<br>tidak berada di<br>Indonesia. | Untuk<br>mengetahui<br>keberadaan<br>artefak<br>manuskrip dan<br>mengembalika<br>n ke<br>Indonesia.  | Membuat<br>program<br>repatriasi<br>artefak<br>manuskrip<br>bekerja<br>sama<br>dengan<br>pemerintah<br>pusat.                            | Kemendikbud<br>dan Kemenlu<br>Disdikbud Aceh<br>Utara        | 2. | Identifikasi keberadaan<br>artefak yang hilang dan<br>tidak berada di<br>Indonesia.<br>Melakukan upaya<br>repatriasi manuskrip. | Mengetahui<br>keberadaan<br>artefak dari<br>manuskrip<br>yang hilang<br>atau<br>mengembalika<br>n artefak<br>manuskrip ke<br>Indonesia<br>sejumlah 5<br>manuskrip. |
|----|--|--|--|--|----|---|--|--|--|--|
| 5. | Manuskrip<br>dimiliki pribadi<br>tanpa<br>perawatan<br>yang baik   | Manuskrip<br>yang dimiliki<br>pribadi dapat<br>dirawat<br>artefaknya<br>dengan baik<br>oleh<br>pemerintah<br>atau<br>pemerintah<br>dapat<br>memperoleh<br>replika dari<br>manuskrip<br>tersebut. | Upaya<br>mengalihkan<br>kepemilikan<br>artefak<br>kepada<br>pemerintah<br>atau<br>mendapatka<br>n replika dari<br>manuskrip<br>tersebut. | Disdikbud Aceh<br>Utara dan<br>pemilik artefak<br>manuskrip. | 1. | Identifikasi manuskrip<br>yang dimiliki oleh<br>pribadi.<br>Alih kepemilikan artefak<br>kepada pemerintah.                      | 10 artefak<br>manuskrip<br>dapat di<br>alihkan atau<br>diperoleh<br>replikannya.   |

# VII.2 Tradisi Lisan

							Indikato	r Capaian	
No	Permasalahan	Tujuan	Rekomendasi	Sasaran	Tahapan Kerja	2024	2029	2034	2039
1	Tidak ada catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai tradisi lisan sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan	Masyarakat memahami sejarah dan pengetahuan mengenai tradisi lisan aceh utara sehingga tradisi lisan dapat dilaksanakan dengan benar	Masyarakat memahami sejarah dan pengetahuan mengenai tradisi lisan aceh utara sehingga tradisi lisan dapat dilaksanakan dengan benar	DBPNB Aceh, isdikbud Aceh Utara, Majelis Adat Aceh Utara, Perguruan Tinggi	<ol> <li>1. Inventarisasi tradisi lisan di Aceh Utara.</li> <li>2. Menyusun catatan pengetahuan mengenai tradisi lisan di Aceh Utara.</li> </ol>	terselenggaran ya kajian untuk menyusun catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai tradisi lisan aceh utara sebanyak 1 kali setahun	terselenggaran ya kajian untuk menyusun catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai tradisi lisan aceh utara sebanyak 1 kali setahun	terselenggaran ya kajian untuk menyusun catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai tradisi lisan aceh utara sebanyak 1 kali setahun	erselenggaran ya kajian untuk menyusun catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai tradisi lisan aceh utara sebanyak 1 kali setahun
2.	idak ada program pertunjukan seni secara berkala	Terdapat program pertunjukan seni secara berkala	Penyusunan agenda seni tahunan	Disbudpar Aceh, Bappeda Aceh Utara, Disdikbud Aceh Utara, Disporapar Aceh Utara dan Pelaku Seni.	<ol> <li>Identifikasi pemangku kepentingan.</li> <li>Diskusi penyusunan agenda tahunan bersama pemangku kepentingan.</li> <li>Pelaksanaan kegiatan agenda tahunan</li> </ol>	Terselenggara nya 2 agenda seni setiap tahun.	Terselenggara nya 3 agenda seni setiap tahun.	Terselenggara nya 3 agenda seni setiap tahun.	Terselenggara nya 7 agenda seni setiap tahun.

# VII.3 Adat Istiasdat

							Indikato	r Capaian	
No	Permasalahan	Tujuan	Rekomendasi	Sasaran	Tahapan Kerja	2024	2029	2034	2039
1	Beberapa adat istiadat sudah tidak dilakukan lagi dalam kehidupan masyarakat sehingga dikhawatirkan adat ini akan hilang.	Menghidupkan kembali adat istiadat dalam kehidupan masyarakat	Sosialisasi dan penyelengga raan prosesi adat istiadat di ruang publik.	Disdikbud Aceh Utara, Majelis Adat Aceh Kab. Aceh Utara, Mukim Gampong	1. Identifikasi adat istiadat yang belum memiliki catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap 2.  Menyusun catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai adat istiadat	terselenggaran ya kajian untuk menyusun catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai adat istiadat aceh utara sebanyak 2 kali setahunt	terselenggaran ya kajian untuk menyusun catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai adat istiadat aceh utara sebanyak 2 setahun	terselenggaran ya kajian untuk menyusun catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai adat istiadat aceh utara sebanyak 2 kali setahun	terselenggaran ya kajian untuk menyusun catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai adat istiadat aceh utara sebanyak 2 kali setahun
3.	Tidak ada catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai adat istiadat sehingga menimbulkan perselisihan mengenai tata cara pelaksanaan adat istiadat di masyarakat.	Masyarakat memahami sejarah dan pengetahuan mengenai adat istiadat aceh utara sehingga perselisihan dapat dihindari	Masyarakat memahami sejarah dan pengetahuan mengenai adat istiadat aceh utara sehingga perselisihan dapat dihindari	BPNB Aceh, Disbudpar Aceh, Disdikbud Aceh Utara, Majelis Adat Aceh Utara, Perguruan Tinggi	1. Identifikasi adat istiadat yang belum memiliki catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap  2. Menyusun catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai adat istiadat	terselenggaran ya kajian untuk menyusun catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai adat istiadat aceh utara sebanyak 2 kali setahun	terselenggaran ya kajian untuk menyusun catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai adat istiadat aceh utara sebanyak 2 kali setahun	terselenggaran ya kajian untuk menyusun catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai adat istiadat aceh utara sebanyak 2 kali setahun	terselenggaran ya kajian untuk menyusun catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai adat istiadat aceh utara sebanyak 2 kali setahun

# VII.4 Ritus

							Indikator	Capaian	
No	Permasalahan	Tujuan	Rekomendasi	Sasaran	Tahapan Kerja	2024	2029	2034	2039
1	Tidak ada catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai Ritus sehingga menimbulkan perbedaan pendapat mengenai tata cara pelaksanaan Ritus di Aceh Utara	Masyarakat memahami sejarah dan pengetahuan mengenai ritus aceh utara sehingga perbedaan pendapat dapat dihindari	Melakukan kajian untuk menyusun catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai ritus aceh utara	Disbudpar Aceh, Disdikbud Aceh Utara, Majelis Adat Aceh Utara, Perguruan Tinggi	<ol> <li>Identifikasi ritus yang belum memiliki catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap.</li> <li>Menyusun catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai Ritus</li> </ol>	terselenggaran ya kajian untuk menyusun catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai ritus aceh utara sebanyak 1 kali setahun	terselenggaran ya kajian untuk menyusun catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai ritus aceh utara sebanyak 1 kali setahun	terselenggaran ya kajian untuk menyusun catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai ritus aceh utara sebanyak 1 kali setahun	terselenggaran ya kajian untuk menyusun catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai ritus aceh utara sebanyak 1 kali setahun

# VII.5 Pengetahuan Tradisional

							Indikato	r Capaian	
No	Permasal Pahan	Tujuan	Rekomendasi	Sasaran	Tahapan Kerja	2024	2029	2034	2039
1	Tidak ada catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai pengetahuan tradisional sehingga tidak dapat dikerjakan dengan baik.	Masyarakat memahami sejarah dan pengetahuan mengenai pengetahuan tradiisional sehingga dapat dikerjakan dengan baik	Melakukan kajian untuk menyusun catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai Pengetahuan tradisional aceh utara	Disdikbud Aceh Utara, Majelis Adat Aceh dan perguruan tinggi	<ol> <li>Inventarisasi         pengetahuan         tradisional aceh di         Aceh Utara.</li> <li>Menyusun catatan         pengetahuan         tradisional di Aceh         Utara.</li> </ol>	terselenggaran ya kajian untuk menyusun catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai pengetahuan tradisional aceh utara sebanyak 2 kali setahun			

# VII.6 Teknologi Tradisional

							Indikato	r Capaian	
No	Permasal Pahan	Tujuan	Rekomendasi	Sasaran	Tahapan Kerja	2024	2029	2034	2039
1.	Kesulitan mendapatkan bahan baku	Tersedianya bahan baku pembuatan tekhnologi tradisional	1. Membuat qanun konservasi hutan untuk sumber daya bahan baku pembuatan tekhnologi tradisional 2. Mewujudkan hutan konservasi.	Gubernur Aceh, Bupati Aceh Utara, OPD yang menjalankan urusan di bidang kehutanan.	Menyusun Rancangan Qanun konservasi hutan untuk sumber daya bahan baku pembuatan tekhnologi tradisional	Tersusun Qanun dan terwujudnya hutan konservasi.	Tersedianya bahan baku pembuatan Tekhnologi tradisional secara domestik.	Tersedianya bahan baku pembuatan Tekhnologi tradisional secara domestik.	Tersedianya bahan baku pembuatan Tekhnologi tradisional secara domestik.
2.	Tidak ada catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai Tekhnologi tradisional sehingga tidak diketahui manfaat dari tekhnologi tradisional tersebut	Masyarakat memahami sejarah dan pengetahuan mengenai Tekhnologi tradiisional sehingga dapat dikerjakan dengan baik	Melakukan kajian untuk menyusun catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai Tekhnologi tradisional aceh utara	Dinas Pertanian Aceh Utara dan perguruan	<ol> <li>Inventarisasi         tekhnologi         tradisional di Aceh         Utara.</li> <li>Menyusun catatan         pengetahuan         mengenai         tekhnologi         tradisional di Aceh         Utara.</li> </ol>	erselenggaran ya kajian untuk menyusun catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai tekhnologi tradisional aceh utara sebanyak 2 kali setahun			

# VII.7 Seni

							Indikator	Capaian	
No	Permasalahan	Tujuan	Rekomendasi	Sasaran	Tahapan Kerja	2024	2029	2034	2039
1	Tidak ada regenerasi seniman tradisional di Aceh Utara.	seniman tradisional di Aceh Utara berjalan dengan baik.	<ol> <li>Memasukan seni tradisional ke dalam muatan lokal.</li> <li>Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengajar seni di sekolah.</li> <li>Meningkatkan kuantitas dan kualitas sanggar seni tradisional.</li> </ol>	Kemendik bud, Disdikbud Aceh Utara, Lembaga pendidikan formal dan non formal.	<ol> <li>Menyusun bahan ajar seni tradisional di sekolah.</li> <li>Pembinaan SDM pengajar seni tradisional.</li> <li>Pembinaan SDM sanggar seni tradisional.</li> </ol>	terselenggara pembinaan untuk 80 orang pengajar seni dan 20 pelatih sanggar seni tradisional setiap tahun.			
2	Ketersedianan bahan baku pembuatan instrumen musik tradisional (Rapai Pasee, Alee Tunyang, Canang Ceureukeh dan Seurunee Kale)	Tersedianya bahan baku pembuatan instrumen musik tradisional secara domestik	1. Membuat qanun konservasi hutan untuk sumber daya bahan baku pembuatan tekhnologi tradisional 2. Mewujudkan hutan konservasi.	Gubernur Aceh, Bupati Aceh Utara, OPD yang menjalanka n urusan di bidang kehutanan.	Menyusun Rancangan Qanun konservasi hutan untuk sumber daya bahan baku pembuatan instrumen.	Tersusun Qanun dan terwujudnya hutan konservasi.	Tersedianya bahan baku pembuatan instrumen musik tradisional secara domestik.	Tersedianya bahan baku pembuatan instrumen musik tradisional secara domestik.	Tersedianya bahan baku pembuatan instrumen musik tradisional secara domestik.

3	Tidak ada ruang pertunjukan dan latihan dengan sarana yang memadai.	Tersedianya ruang pertunjukan dan latihan dengan sarana yang memadai.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas ruang pertunjukan dan latihan dengan sarana yang memadai.	Kemendik bud, Disbudpar Aceh, Disdikbud Aceh Utara, Lembaga pendidikan formal dan non formal.		Inventarisasi jumlah ruang pertunjukan dan latihan di Aceh Utara. Menentukan kebutuhan ruang pertunjukan dan latihan ruang pertunjukan dan latihan dengan sarana yang memadai. Program peningkatan kualitas dan kuantitas ruang pertunjukan dan pelatihan.	Terselenggara nya 3 agenda seni setiap tahun.	Terselenggara nya 5 agenda seni setiap tahun.	Terselenggara nya 7 agenda seni setiap tahun.	Terselenggara nya 310agenda seni setiap tahun.
4	Tidak adanya catatan pengetahuan mengenai seni tradisional di Aceh Utara.	Mewujudkan catatan pengetahuan mengenai seni tradisional di Aceh Utara secara lengkap	Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi untuk melakukan pencatatan pengetahuan mengenai seni tradisional di Aceh Utara.	BPNB Aceh, Bappeda Aceh Utara, Disdikbud Aceh Utara, DKA Aceh Utara,	1.	Inventarisasi seni tradisional di Aceh Utara. Menyusun catatan pengetahuan mengenai seni tradisional di Aceh Utara.	Terdapat 2 seni tradisional Aceh Utara yang telah tercatat pengetahuann ya secara lengkap setiap tahun			

# VII. 8 Bahasa

							Indikator	Capaian	
No	Permasalahan	Tujuan	Rekomendasi	Sasaran	Tahapan Kerja	2024	2029	2034	2039
1	Tidak ada regenerasi penutur bahasa Melayu Pasee di Aceh Utara.	penutur bahasa melayu Pasee di Aceh Utara berjalan	<ol> <li>Memasukan tata bahasa Melayu Pasee ke dalam muatan lokal.</li> <li>Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengajar Bahasa Aceh Pasee di sekolah.</li> </ol>	Disdikbud Aceh Utara, Lembaga pendidikan formal	<ol> <li>Menyusun bahan ajar bahasa Aceh Pasee di sekolah.</li> <li>Pembinaan SDM pengajar bahasa Melayu pasee.</li> </ol>	terselenggara pembinaan untuk 50 orang pengajar bahasa aceh pasee	terselenggara pembinaan untuk 50 orang pengajar bahasa aceh pasee	terselenggara pembinaan untuk 50 orang pengajar bahasa aceh pasee	terselenggara pembinaan untuk 50 orang pengajar bahasa aceh pasee
2	Tidak ada catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai Bahasa Tradisional	Masyarakat memahami sejarah dan pengetahuan mengenai bahasa tradisional sehingga dapat ditutrkan dengan baik dimasyarakat	Melakukan kajian untuk menyusun catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai bahasa aceh Pasee yang ada di Aceh utara	Disdikbud Aceh Utara, Perguruan Tinggi	Menyusun catatan pengetahuan mengenai bahasa Melayu pasee di Aceh Utara.	terselenggaran ya kajian untuk menyusun catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai bahasa aceh pase di utara sebanyak 1 dokumen	-	-	-

# VII. 9 Permainan Rakyat

						Indikator Capaian			
No	Permasalahan	Tujuan	Rekomendasi	Sasaran	Tahapan Kerja	2024	2029	2034	2039
1	Tidak ada regenerasi permainan rakyat di Aceh Utara.	Regenerasi permainan rakyat di Aceh Utara berjalan dengan baik.	Sosialisasi dan eksibisi permainan rakyat di ruang publik.	Disdikbud Aceh Utara, Disporapar Aceh Utara	<ol> <li>Inventarisasi permainan rakyat yang ada di Aceh Utara.</li> <li>Sosialiasi dan eksibisi permainan rakyat</li> </ol>	Sosialisasi dan eksibisi permainan rakyat di ruang publik terjadi 1 kali setiap tahun.	Sosialisasi dan eksibisi permainan rakyat di ruang publik terjadi 2 kali setiap tahun.	Sosialisasi dan eksibisi permainan rakyat di ruang publik terjadi 3 kali setiap tahun.	Sosialisasi dan eksibisi permainan rakyat di ruang publik terjadi 4 kali setiap tahun.
2	Tidak ada catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai permainan rakyat sehingga menimbulkan perbedaan mengenai aturan Permainan di masyarakat.	Masyarakat memahami sejarah dan pengetahuan mengenai permainan rakyat aceh utara sehingga perbedaan aturan permainan dapat dihindari	Melakukan kajian untuk menyusun catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai permainan rakyat aceh utara	Disdikbud Aceh Utara, Disporapar Aceh Utara dan perguruan tinggi	<ol> <li>nventarisasi         permainan rakyat di         Aceh Utara.</li> <li>Menyusun catatan         pengetahuan         mengenai         permainan rakyat di         Aceh Utara.</li> </ol>	terselenggaran ya kajian untuk menyusun catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai permainan rakyat aceh utara sebanyak 1 kali setahun			

# VII. 10 Olahraga Tradisional

							Indikator Capaian			
No	Permasalahan	Tujuan	Rekomendasi	Sasaran		Tahapan Kerja	2024	2029	2034	2039
1	Tidak ada catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai olahraga tradisionanl sehingga menimbulkan perbedaan mengenai tatacara pelaksanaan- nya di masyarakat.	Masyarakat memahami sejarah dan pengetahuan mengenai permainan rakyat aceh utara sehingga perbedaan tatcara pelaksanaan nya dapat dihindari	Melakukan kajian untuk menyusun catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai olahraga tradisional aceh utara	Disdikbud Aceh Utara, Disporapar Aceh Utara dan perguruan tinggi	2.	Inventarisasi olahraga tradisional di Aceh Utara. Menyusun catatan pengetahuan mengenai olahraga tradisional di Aceh Utara.	terselenggaran ya kajian untuk menyusun catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai olahraga tradisional aceh utara sebanyak 1 kali setahun			
2	idak ada regenerasi pelaku olahraga tradisional di Aceh Utara.	Regenerasi pelaku olahraga tradisional di Aceh Utara berjalan dengan baik.	<ol> <li>Menyusun bahan ajar olahraga tradisional di sekolah.</li> <li>Pembinaan SDM pelatih olahraga tradisional.</li> <li>Pembinaan SDM sanggar seni tradisional.</li> </ol>	Disdikbud Aceh Utara, Lembaga pendidikan formal	<ol> <li>2.</li> <li>3.</li> </ol>	Menyusun bahan ajar olahraga tradisional di sekolah. Pembinaan SDM pelatih olahraga tradisional. Pembinaan SDM sanggar seni tradisional.	terselenggara pembinaan untuk 50 orang pengajar olahraga tradisional setiap tahun.	terselenggara pembinaan untuk 50 orang pengajar olahraga tradisional setiap tahun.	terselenggara pembinaan untuk 50 orang pengajar olahraga tradisional setiap tahun.	terselenggara pembinaan untuk 50 orang pengajar olahraga tradisional setiap tahun.

# VII. 11 Cagar Budaya

						Indikator Capaian			
No	Permasalahan	Tujuan	Rekomendasi	Sasaran	Tahapan Kerja	2024	2029	2034	2039
1	Sebagian besar pengelolaan cagar budaya belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai	Seluruh pengelolaan cagar budaya didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai	Pengalokasian anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengelola cagar budaya	Disdikbud Aceh Utara, Bappeda Aceh Utara, DPRK Aceh Utara, Bupati Aceh Utara, Disporapar Aceh Utara	<ol> <li>Inventarisasi         Sebagian besar         pengelolaan cagar         budaya yang belum         didukung dengan         sarana dan prasarana         yang memadai.</li> <li>Penyusunan         anggaran untuk         penyediaan sarana         dan prasarana         pendukung</li> </ol>	3 cagar budaya mendapatkan sarana dan prasarana yang memadai setiap tahun	3 cagar budaya mendapatkan sarana dan prasarana yang memadai setiap tahun	3 cagar budaya mendapatkan sarana dan prasarana yang memadai setiap tahun	3 cagar budaya mendapatkan sarana dan prasarana yang memadai setiap tahun
2	kurangnya catatan sejarah dan pengetahuan mengenai cagar budaya di Aceh Utara Khususnya yang berkaitan dengan Kerajaan Islam samudra Pasai	Masyarakat memahami sejarah dan pengetahuan mengenai cagar budaya di Aceh Utara Khususnya yang berkaitan dengan Kerajaan Islam samudra Pasai	Melakukan kajian untuk menyusun catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai cagar budaya di Aceh Utara Khususnya yang berkaitan dengan Kerajaan Islam samudra Pasai	Kemendikbud RI, BPCB, Disdikbud Aceh Utara, Perguruan Tinggi	<ol> <li>Identifikasi cagar budaya yang belum memiliki catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap.</li> <li>Melakukan Kajian cagar budaya di Aceh Utara Khususnya yang berkaitan dengan Kerajaan Islam samudra Pasai</li> </ol>	terselenggaran ya kajian untuk menyusun catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai cagar budaya di Aceh Utara Khususnya yang berkaitan dengan Kerajaan Islam samudra Pasai aceh utara sebanyak 2 kali setahun	terselenggaran ya kajian untuk menyusun catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai cagar budaya di Aceh Utara Khususnya yang berkaitan dengan Kerajaan Islam samudra Pasai aceh utara sebanyak 2 kali setahun	terselenggaran ya kajian untuk menyusun catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai cagar budaya di Aceh Utara Khususnya yang berkaitan dengan Kerajaan Islam samudra Pasai aceh utara sebanyak 2 kali setahun	terselenggaran ya kajian untuk menyusun catatan sejarah dan pengetahuan yang lengkap mengenai cagar budaya di Aceh Utara Khususnya yang berkaitan dengan Kerajaan Islam samudra Pasai aceh utara sebanyak 2 kali setahun

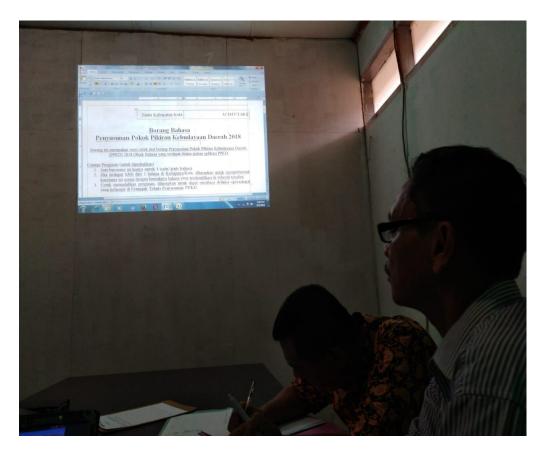
3	Belum adanya tim ahli cagar budaya yang sesuai dengan kebutuhan aceh utara	Aceh Utara memiliki tim ahli cagar budaya	Pembentukan tim ahli cagar budaya aceh utara	Kemendikbud, Disbudpar Aceh,Disdikbu d Aceh Utara dan Perguruan Tinggi	<ol> <li>Identifikasi akademisi potensial sebagai calon Tim Ahli Cagar Budaya.</li> <li>Sertifikasi Ahli Cagar Budaya.</li> </ol>	Aceh Utara memiliki tim ahli cagar budaya	-	-	-
4	Kuantitas dan kualitas Juru Pelihara belum memenuhi kebutuhan Aceh Utara	Aceh Utara memiliki juru pelihara dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.	Perekrutan dan pembinaan Juru Pelihara Cagar Budaya di Aceh Utara	Kemendikbud, BPCB Aceh, Disdikbud Aceh Utara	<ol> <li>Identifikasi         Kebutuhan Juru         Pelihara Cagar         Budaya.</li> <li>Rekrutmen Juru         Pelihara Cagar         Budaya.</li> <li>Pembinaan Juru         Pelihara Cagar         Budaya</li> <li>Budaya</li> </ol>	Seluruh situs cagar budaya di Aceh Utara di pelihara sekurang- kurangnya 1 orang Juru Pelihara	Seluruh situs cagar budaya di Aceh Utara di pelihara oleh Juru Pelihara dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan	Seluruh situs cagar budaya di Aceh Utara di pelihara oleh Juru Pelihara dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan	Seluruh situs cagar budaya di Aceh Utara di pelihara oleh Juru Pelihara dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan















#### **BUPATI ACEH UTARA**

## KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 430/421/2018

#### TENTANG

# PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN POKOK-POKOK-PIKIRAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACÉH UTARA

#### BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kbudayaan, maka perlu membentuk Tim Penyusun Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
  - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh:
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 kedua tentang Pemerintahan Daerah;
  - 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2004 tentang Kebudayaan Aceh;
  - 8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat;
  - 9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran

Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara, dengan susunan Tim

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan di

Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas menyusun Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Aceh Utara melalui proses dan format laporan yang diarahkan oleh Menteri

Pndidikan dan Kebudayaan;

KETIGA: Untuk Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Keputusan ini,

akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara;

KEEMPAT : Tim Penyusun Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan dalam

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati

Aceh Utara;

KELIMA : Pelaksanaan tugas yang ditetapkan dalam Keputusan ini

dimulai sejak tanggal 5 Juni 2018;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan

ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kabupaten Aceh Utara;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Lhokseumawe, pada tanggal <u>7 September 2018 M</u> 26 Zulhijjah 1439 H

UPATI ACEH UTARA,

MUHAMMAD THAIB

#### LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR: 430/ 421/2018

TANGGAL: 7 SEPTEMBER 2018 M

26 ZULHIJJAH 1439 H

#### SUSUNAN TIM PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH UTARA **TAHUN 2018**

Penasehat

: Bupati Aceh Utara

Pengarah

: Wakil Bupati Aceh Utara

Pembina

Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara

Koordinator : Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh Dan

Kesejahteraan Rakvat

Ketua

: Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabupaten Aceh Utara

Sekretaris

: Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Aceh Utara

Anggota

- Amirullah, Lc (Majelis Adat Aceh Kab. Aceh Utara) 1.
- Drs. Isa Anshari, MM (Budayawan)
- Saifuddin Dhuhri, Lc, Ma (Dosen IAIN Malikussaleh Lhokseumawe) 3
- 4. M. Yunus, SE (Majelis Adat Aceh Kab. Aceh Utara)
- Mahdi Idris, S.H.I. (Seniman)
- Oeyoeng Wallad (Seniman)
- 7. T. Saifuddin (Dewan Kesenian Kab. Aceh Utara)
- 8. Inong Sofiarini, S.STP, S.Sos, M.Si (BAPPEDA Kab. Aceh Utara)
- Zulfikar, Z, S. Pd, MT (BAPPEDA Kab Aceh Utara)
- 10. Fadhil, SH, MH (Bagian Hukum Setda Kab. Aceh Utara)
- 11. U. Supianto, SH (Bagian Hukum Setda Kab. Aceh Utara)
- 12. Sarjan, S. Pd M. Kom, I (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Utara)
- 13. Aswintamy, SE (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Utara)
- 14. Ramin, ST (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Utara)
- 15. Atikah, SE (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Utara)
- 16. Husnan, S. Sos (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Utara)
- 17. Cut Intan Keumala Sari S.Pd (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Utara)
- 18 Yudi Utowo, SE (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Utara)
- 19. Mirza (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Utara)
- Faridah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Utara)

TI ACEH UTARA